



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri
Hari, Tanggal	: Selasa, 26 Januari 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka dan ditutup dengan Sifat Tertutup
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	: H. Teuku Riefky Harsya, M.T., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2020;</li><li>2. Realisasi Anggaran Kementerian Luar Negeri T.A. 2020;</li><li>3. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2021;</li><li>4. Isu-isu Aktual Bidang Kementerian Luar Negeri :<ol style="list-style-type: none"><li>a). Perkembangan Diplomasi Vaksin Covid-19 guna Program Vaksinasi Nasional;</li><li>b). Kebijakan perlindungan WNI di Luar Negeri dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19; dan</li><li>c). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan Kawasan : Perkembangan di AS; Palestina; Afghanistan dan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik.</li></ol></li></ol>

Hadir	: <b>PIMPINAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meutya Viada Hafid (F-PG)</li><li>2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)</li><li>3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)</li><li>4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)</li><li>5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)</li></ol>
-------	---

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)**

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Charles Honoris
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.

13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri

#### **FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus
19. Nurul Arifin, M.Si.
20. Dr. H.M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
21. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
22. Ilham Pangestu

#### **FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

23. Sugiono
24. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
25. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
26. Rachel Maryam Sayidina
27. Fadhlullah, S.E.
28. R. Imron Amin, S.H., M.H.

#### **FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

29. Prananda Surya Paloh
30. Muhammad Farhan
31. Kresna Dewanata Phrosakh
32. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
33. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

#### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

34. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
35. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
36. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
37. A. Helmy Faishal Zaini
38. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

#### **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

39. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
40. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
41. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.

#### **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

42. H. Sukamta, Ph.D.
43. KH. Toriq Hidayat, Lc.
44. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

#### **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

45. Ir. Alimin Abdullah
46. H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P.
47. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
48. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

49. H. Syaifullah Tamiha, S.Pi., M.S.

50. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

- Anggota yang Izin : 1. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)  
2. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS)
- Undangan : 1. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi.  
2. Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar.  
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan.  
Beserta Jajaran.

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua.**

**Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Luar Negeri, Pak Wamen beserta jajaran,  
Rekan-rekan anggota Komisi I dan seluruh jajaran dari Kemenlu yang hadir pada, melalui zoom,  
Juga rekan-rekan Komisi I yang hadir melalui zoom,**

Pertama-tama kami sampaikan bahwa rapat hari ini sudah dihadiri oleh 9 fraksi, anggota yang konfirmasi hadir fisik ada 12, dan secara virtual sementara ini ada 9. Seperti biasa, maka rapat ini juga akan diawali dengan rapat terbuka dan mungkin nanti pada saat pendalaman, bila ada hal-hal khusus yang akan disampaikan, maka rapat ini dapat ditutup atau tertutup, dilakukan secara tertutup, pada saat nanti *calls*nya kami serahkan kepada Ibu Menlu.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.27 WIB)  
(KETUK PALU: 1X)**

**Bapak/Ibu yang Kami hormati,**

Kami mengucapkan selamat kepada Saudari Menteri Luar Negeri atas terpilihnya sebagai ketua bersama atau *Co-Chair Covax Advance Market Commitment Engagement Group*, dan Komisi I menyambut baik atas terpilihnya Ibu karena kehadiran *Covax Advance Market Commitment Engagement Group* menjadi peluang besar bagi Indonesia dalam mengamankan ketersediaan vaksin ditengah-tengah ancaman negara-negara berpendapatan menengah ke atas yang melakukan pembelian dalam jumlah besar. Kita berikan applause untuk Ibu Wamen.

**(APPLAUSE UNTUK IBU MENLU RI)**

Dan dalam raker hari ini, Komisi I ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu Menlu terkait beberapa hal, yang pertama Evaluasi pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2020; Realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri T.A. 2020; Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2021; kemudian ada beberapa isu-isu aktual antara lain : a. Perkembangan diplomasi vaksin Covid-19 guna program vaksinasi nasional; kemudian yang kedua, Kebijakan perlindungan WNI di luar negeri dalam menghadapi gelombang kedua Covid-19; dan Akses masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri terhadap vaksinasi yang dilakukan Pemerintah; kemudian Kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap perkembangan di dunia dan kawasan perkembangan di AS, Palestina, Afganistan, dan stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik.

Sebelum kami mempersilakan Ibu Menlu menyampaikan paparan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan, ada beberapa pergantian anggota fraksi-fraksi di Komisi I. Yang pertama adalah Bapak Hasbi Anshory dari Fraksi Nasdem, ini baru bergabung. Hadir atau

tidak, Bapak? Belum ya. Yang kedua, adalah Bapak Anton Sukartono Suratno, dari Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):**

***Assalamualaikum.***

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Berdiri dulu Pak. Nah.

Jadi Ibu izin, ini kebetulan sekalian juga ingin pamit sama Ibu, Beliau nanti Insya Allah akan menggantikan saya akan menjadi Pimpinan Komisi I, karena kami ada penugasan lain. Tetapi karena cintanya dengan Kemlu, saya tetap menjadi anggota di Komisi I, begitu.

Selanjutnya juga ada anggota yang pindah dari Komisi I yaitu Bapak Willy Aditya dari Fraksi Nasdem, pindah ke Komisi XI. Kemudian Bapak Hasan Saleh, Fraksi Partai Demokrat pindah ke Komisi IX dan Bapak Abdul Kadir Karding pindah ke Komisi VII.

Baik Ibu, selanjutnya kami persilakan untuk Ibu menyampaikan paparan pada hari ini. Kami persilakan.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.**

**Yang sangat Saya hormati Ketua Pimpinan dan Anggota Komisi I baik yang hadir maupun yang hadir secara virtual,**

Mengawali rapat kerja kali ini, tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021, semoga 2021 menjadi tahun yang lebih sehat dan lebih baik bagi kita semua. Dan di awal pertemuan, izinkanlah kami memperkenalkan beberapa Eselon I Kementerian Luar Negeri yang baru, yang baru saja bergabung. Yang pertama adalah Duta Besar Abdul Kadir Jaelani sebagai Dirjen Asia-Pasifik-Afrika. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Ottawa. Sudah berdiri? Yang kedua adalah Duta Besar Arto Suryodiputro, Dirjen Kerja sama Asean, sebelumnya Beliau adalah Duta Besar kita di New Delhi. Yang ketiga adalah Duta Besar Muchsin Shihab, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, sebelumnya Beliau adalah Deputy Wakil Tetap RI untuk Dewan Keamanan PBB di New York. Izin, Pak WATAB kita di New York juga mengikuti secara langsung secara virtual. Yang keempat adalah Duta Besar Tritariat, yang kemarin baru saja dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Beliau masih menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait. Dan Duta Besar Siti Nugraha Maulidiah, Staf Ahli Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, sudah dilantik namun Beliau sedang mempersiapkan kepulangannya dari Warsawa, pada akhir bulan ini, dan Beliau mengikuti secara virtual dari Warsawa.

Sesuai dengan acara agenda rapat hari ini, izinkan kami menyampaikan *up date* beberapa isu terkini yaitu menyangkut diplomasi vaksin, perlindungan WNI selama pandemi dan beberapa isu aktual lain. Beberapa isu aktual sudah kami masukkan di dalam masukan

tertulis kepada Sekretariat Komisi I. Sementara isu terkait evaluasi kerja, realisasi anggaran 2020 serta persiapan, kesiapan anggaran 2021, dengan izin Pimpinan dan Anggota, akan disampaikan oleh Sekjen Kemlu. Sementara khusus untuk keanggotaan atau berakhirnya keanggotaan Indonesia di dalam Dewan Keamanan PBB, akan disampaikan langsung oleh WATAB kita di New York secara virtual. Semua bahan tertulis telah kami sampaikan ke Sekretariat Komisi I.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Perkenankanlah kami menyampaikan, pertama, isu pelaksanaan diplomasi vaksin. Kami ingin sedikit mengulangi mengenai pendekatan yang diambil Pemerintah Indonesia terkait vaksin. Yaitu pertama adalah pendekatan jangka pendek, yaitu memperoleh akses vaksin melalui kerja sama dengan pihak lain, baik melalui track bilateral maupun track multilateral. Kedua adalah pendekatan jangka panjang dengan membangun kemandirian vaksin melalui pengembangan vaksin nasional. Karena kita tahu sebagai negara besar, Indonesia tidak boleh terus menggantungkan diri pada pihak lain. Dengan izin Ibu-Bapak, kami akan memfokuskan pada pendekatan yang pertama yaitu upaya memperoleh vaksin melalui kerja sama dengan pihak lain, baik secara bilateral maupun multilateral.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Dari sejak awal pandemi, diplomasi Indonesia terus berupaya berkontribusi, baik dalam pengadaan alat diagnostik, theuropatik maupun pengadaan vaksin. Tugas utama diplomasi adalah meratakan jalan, membuka akses. Semua simpul *networking* kita, *networking*, kita coba untuk dibuka guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai vaksin, dari track bilateral, sejauh ini kita telah mengamankan komitmen dan pasokan dari Sinovac, Astra Zeneca dan Novavacs. Pembicaraan dengan Pfizer dan Modena terus dijalin sampai saat ini. Sementara itu Indonesia juga terus menjalin kerja sama akses vaksin dari track multilateral, yaitu melalui *Covax Facility*, yang dikelola oleh WHO, GAVI, dan CEPI. Indonesia terus menjalin kontak sejak lama dengan 3 organisasi tersebut. Sebagai salah satu negara Covax AMC (*Advance Market Commitment*) atau biasanya disebut AMC-92 yaitu 92 negara penghasil menengah dan rendah, maka Indonesia diperkirakan akan dapat memperoleh vaksin secara gratis, sebesar 3%-20% penduduk. Jenis vaksin, besaran vaksin dan waktu *delivery*, saat ini masih akan terus dibahas di Genewa, melalui *joint allocation task force*, yang akan melakukan pertemuan menjelang akhir Januari ini.

Dapat kami laporkan dan tadi sudah disinggung oleh Ketua, terima kasih, kami baru saja terpilih sebagai salah satu *Co-chair* dari *Covax AMC Engagement Group*, yaitu forum konsultasi yang mempertemukan negara donor dan AMC-92 guna membahas isu akses vaksin yang setara bagi semua negara. Syukur alhamdulillah, Indonesia terpilih dengan suara terbanyak, yaitu 41% dari total suara masuk negara-negara AMC-92. Terdapat 3 *co-chair*, yaitu Canada mewakili negara donor, kemudian mewakili negara AMC-92 adalah Indonesia dan Ethiopia. Dan yang menarik Pimpinan serta anggota yang terhormat, kami bertiga semuanya adalah perempuan sebagai *co-chair*.

**(APPLAUSE)**

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Kemarin tanggal 25 Januari hingga malam hari, sebagai *co-chair*, kita bertiga telah bertemu secara virtual untuk mempersiapkan Covax AMC EG, pertemuan Covax AMC EG

yang akan dilakukan besok, tanggal 27 Januari. Akses kesetaraan vaksin bagi semua negara utamanya negara berkembang dan kurang berkembang, merupakan prioritas yang harus terus diperjuangkan dalam *co-chairmanship* tersebut. Harus diakui Ibu-Bapak, bahwa dinamika lapangan terkait pengadaan vaksin masih sangat tinggi. Dan kita akan terus memantau semua dinamika yang terjadi di lapangan.

Untuk kepentingan domestik, untuk kepentingan masyarakat kita di dalam negeri, jika upaya mengamankan pasokan vaksin baik melalui jalur bilateral maupun multilateral berjalan dengan lancar, Insya Allah jumlah yang akan diperoleh akan mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Dan tadi Bapak Ketua menyampaikan mengenai bagaimana akses vaksin terhadap warga negara kita di luar negeri dan lain sebagainya, yang dapat kami sampaikan pada saat ini adalah mengingat ketersediaan vaksin masih sangat terbatas dan sesuai dengan rekomendasi WHO, maka mau tidak mau, semua Pemerintah/negara akan memberikan prioritas kepada beberapa kelompok antara lain yang paling pertama adalah nakes, kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok yang masuk di dalam *vulnerable groups*, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bekerja pada *essential*, mereka istilahnya *essentials bussiness worker*. Jadi kita ikuti rekomendasi WHO. Dan untuk WNI kita yang ada di luar negeri, kita telah melakukan pendekatan kepada pemerintah negara setempat, karena sekali lagi kebijakan akan ikut dari negara setempat, dan kita sudah sampaikan pendekatan untuk mendapatkan perhatian. Beberapa warga negara kita yang masuk dalam kelompok *vulnerable groups*, sudah terdaftar dan sebagian sudah mendapatkan vaksin dari negara setempat. Demikian juga berlaku bagi para diplomat kita di luar negeri.

#### **Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Izinkan kami masuk kepada isu yang kedua, yaitu perlindungan WNI. Sejak awal pandemi, fokus diplomasi terus berupaya untuk menyelamatkan dan membantu WNI terutama yang terdampak pandemi ini. Sebelum membahas strategi perlindungan WNI tahun 2021, izinkan kami menyampaikan beberapa *up date* informasi mengenai WNI yang terpapar covid-19 di luar negeri, repatriasi WNI dan ABK, serta jumlah bantuan kepada WNI kita yang ada di luar negeri. Hingga Senin, 25 Januari, jumlah WNI yang terpapar covid adalah sebagai berikut: Total kasus positif 2.948, masih dirawat 687, sudah sembuh 2.090, dan yang meninggal dunia 171 orang. Sebagian besar kasus WNI terpapar covid terjadi di Singapura, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Kuwait, Korea Selatan, Malaysia, Qatar, Taiwan, dan Persatuan Emirat Arab. Sejak awal pandemi di tahun 2020, kita juga telah mengevakuasi dan memberikan fasilitasi repatriasi kembali ke Indonesia kepada 180.045 orang WNI. Sementara itu lebih dari setengah juta sembako telah kita sampaikan kepada WNI di luar negeri yang terimbas dampak covid-19, di mana 451.348 kepada WNI di Malaysia, sementara yang diluar Malaysia jumlahnya adalah 83.916. Sudah dapat dipastikan Ibu-Bapak, bahwa di tahun 2021, isu perlindungan WNI terkait pandemi masih akan terus berjalan.

Selain penanganan perlindungan di lapangan yang telah kami sampaikan tadi, Kementerian Luar Negeri juga akan memperkuat sistem atau infrastruktur perlindungan WNI diseluruh perwakilan, antara lain pemberian dukungan anggaran yang memadai bagi penanganan perlindungan, kemudian percepatan pendataan WNI secara serempak dan seragam di 129 perwakilan RI dan KDEI Taipei menggunakan portal peduli WNI. Serta pembangunan *integrated data operation center (i-doc)* dilingkungan Kementerian Luar Negeri. Pembangunan i-doc sebagai sistem informasi 24 jam, diharapkan dapat menjalankan berbagai fungsi pelayanan, antara lain *security operation center*, *customer service operation center*, *network operation center*, *technical support center* dan *digital operation center*.

Selain perlindungan WNI terdampak covid-19, selama tahun 2020, kita juga menyaksikan peningkatan permasalahan ABK. Khususnya yang bekerja di beberapa kapal

diantaranya yang berbendera RRT. Untuk periode Januari- Desember 2020, terdapat 692 ABK Indonesia tercatat mengalami permasalahan pada 115 kapal perikanan milik perusahaan atau warga negara RRT. Upaya penanganan ABK sebagaimana pekerja migran Indonesia lainnya, memang harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, baik di hilir dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah di sektor hulunya, yaitu di tanah air. Di hilir, menjadi ranah Kementerian Luar Negeri, kita telah melakukan berbagai upaya dan pendekatan diplomasi untuk mengatasi isu ABK selama ini baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral misalnya komunikasi tingkat tinggi telah dilakukan secara intensif, antara lain dengan Menteri Luar Negeri RRT untuk penanganan kasus ABK ini. Selain meminta penyelesaian kasus yang sedang dihadapi dengan segera, Indonesia juga meminta Pemerintah RRT melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan kapal, terhadap situasi kerja para ABK, sehingga berbagai masalah tersebut tidak terulang lagi.

Indonesia juga sedang mendorong mekanisme kerja sama bilateral hukum timbal balik (*mutual legal assistant*). Dari aspek multilateral, melalui IMO *Maritime Security Committee*, delegasi Indonesia juga turut mendorong pengesahan resolusi terkait fasilitasi pergantian awak kapal dan akses layanan medis dan kemudahan pergerakan awak kapal selama masa pandemi. Selain itu melalui PBB, Indonesia memprakarsai pengesahan resolusi Majelis Umum PBB mengenai *International Cooperation to Address Challenges Faced by Seafarers as a Result of The Covid-19 Pandemics to Support Global Supply Chains*. Berbagai upaya tersebut, alhamdulillah telah membuahkan hasil, dan hingga Desember 2020, telah berhasil dipulangkan 589 ABK dari 98 kapal ikan, termasuk pemulangan secara langsung melalui jalur laut, sejumlah 163 ABK. Hak gaji yang belum dibayar, berangsur-angsur juga telah diselesaikan.

Di hulu, saya sendiri langsung berbicara dengan Kabareskrim untuk melakukan tindakan tegas, kepada perusahaan pengirim ABK yang melanggar, termasuk melakukan investigasi dugaan adanya kejahatan *trafficking in person*. Kami sadari betul, tata kelola harus ditangani sekali lagi, secara komprehensif, kalau kita benar-benar ingin melihat perubahan yang mendasar. Tidak boleh ada lagi tumpang-tindih peraturan penempatan ABK ke luar negeri, perjanjian kerja laut yang ditandatangani ABK juga harus terstandarisasi, dan kompetensi dasar untuk bekerja di kapal ikan harus terjamin dan tersertifikasi. Oleh karenanya di tahun 2021, upaya perlindungan terhadap ABK akan dilakukan secara lebih komprehensif, yaitu antara lain melalui pembentukan *road map* ratifikasi ILO C188 *Work in Fishing Convention*, kemudian MoU penempatan khusus ABK Perikanan dengan negara tujuan, serta pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku.

### **Pimpinan dan Anggota yang Saya hormati,**

Untuk perkembangan dunia dan kawasan, izinkan kami menyampaikan 3 isu. Yaitu berakhirnya keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, yang tadi saya sampaikan dengan izin Pimpinan dan Anggota, akan disampaikan langsung oleh Watab di New York. Kemudian yang kedua adalah hasil pertemuan retreat para Menlu Asean pada 21 Januari, dan harapan Indonesia terhadap administrasi baru Amerika Serikat.

Saya ingin memulai dengan pertemuan retreat para Menteri Luar Negeri Asean. Retreat dipimpin oleh Menlu Brunei Darussalam sebagai *Chair Asean* untuk tahun 2021 yang mengambil tema *We Care, We Prepare, We Prosper*. Beberapa hal penting yang mengemuka selama retreat, pertama adalah pembentukan *Ad Hoc Task Force*, untuk mempersiapkan pembentukan *Asean Travel Corridor Arrangement Frame Work*, dan disepakati juga *Ad Hoc Task Force* ini diketuai oleh Indonesia.

Yang kedua adalah besarnya harapan negara Asean terhadap terwujudnya kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara, terutama melalui jalur multilateral.



Negara-negara anggota Asean mengharapkan agar Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sebagai *Co-chair Covax AMC EG* untuk dapat terus memperjuangkan aspirasi tersebut.

Yang ketiga, atas usul Indonesia, Asean telah menyampaikan harapan Asean terhadap administrasi baru Amerika Serikat untuk memperkuat multilateralisme dan kerja sama internasional untuk mitigasi pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi. Asean juga mengharapkan agar Amerika Serikat terus berkontribusi bagi terciptanya kawasan yang damai, stabil dan sejahtera. Selanjutnya penekanan pentingnya terus menjaga sentralitas kesatuan dan prinsip-prinsip Asean, khususnya dalam situasi di mana rivalitas semakin menajam, juga disampaikan Indonesia di dalam pertemuan tersebut. Disaat yang sama, Indonesia juga meminta semua negara mitra Asean agar menghormati prinsip-prinsip tersebut. Kita juga menyampaikan dorongan kepada Pemerintah Myanmar, agar menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State, agar repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat dapat terlaksana. Kita juga menekankan pentingnya menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai laut damai dan stabil, di mana semua negara harus menghormati dan menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

### **Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Beralih ke isu selanjutnya yaitu administrasi baru Amerika Serikat. Pertama tentunya kita sampaikan selamat dan atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat yang baru. Presiden Jokowi telah menyampaikan ucapan selamat, dan kesiapan Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika, yang bukan saja akan bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga bagi dunia. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis dan terpenting Indonesia. Sejak 2015, Indonesia telah membangun kemitraan strategis yang setara, saling menghormati dan saling menguntungkan. Kedua negara juga memiliki kesamaan nilai atau *share values*. Ini semua diharapkan menjadi modal dasar yang dapat memperkuat kemitraan kedua negara ke depan. Pelantikan administrasi baru Amerika dibawah Biden-Harris memberikan harapan baru bagi dunia, disaat dunia masih menghadapi pandemi dan upaya pemulihan ekonomi. Saat ini dunia memerlukan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat. Kontribusi Amerika tentu sangat diharapkan.

Dalam kaitan ini ditingkat global, Indonesia mengharapkan komitmen Amerika Serikat untuk 3 hal utama, pertama mitigasi pandemi melalui kerja sama multilateral. Dunia membutuhkan kerja sama global untuk dapat mengatasi pandem ini secepatnya. Tentunya sebagai negara besar, Indonesia berharap Amerika dapat mengambil peran besar dalam penanganan pandemi. Dan alhamdulillah, salah satu kebijakan pertama yang diambil Pemerintahan Biden, termasuk adalah Amerika kembali menjadi anggota WHO dan bahkan menjadi bagian dari ACT Accelator dan Covax, untuk mendorong kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Bagi Indonesia, penguatan WHO adalah solusi terbaik dalam menangani pandemi, termasuk mempersiapkan mekanisme global dalam menghadapi pandemi yang akan datang. Yang kedua mengenai pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia, Indonesia mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi kontributor untuk menciptakan dunia yang lebih aman, damai dan stabil. Penguatan kontribusi Amerika juga dibutuhkan untuk penyelesaian berbagai konflik secara damai, termasuk untuk isu Palestina-Israel. Indonesia berharap administrasi baru Amerika Serikat akan berkontribusi bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel yang berkeadilan, berdasar pada Resolusi PBB maupun parameter internasional yang disepakati termasuk solusi dua negara.

Terkait *peace* proses di Afganistan, Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat mendukung proses perdamaian yang lestari dan inklusif, termasuk mendorong berlanjutnya peran perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan di Afganistan. Sementara di Kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, menjadi kepentingan Amerika Serikat

untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan Asean dan memperkuat Asean. Kawasan ini termasuk Laut China Selatan, akan tetap stabil dan damai, jika semua negara menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Kemitraan yang kuat juga diharapkan dalam pelaksanaan *Asean Outlook on The Indo Pacific* yang bersifat terbuka dan mengedepankan dialog serta kerja sama. Yang ketiga, pembangunan tata ekonomi dunia yang kokoh dan berkelanjutan. Peran Amerika Serikat diharapkan dapat mendorong sistem perdagangan dunia yang terbuka, berkeadilan dan saling menguntungkan. Juga dalam konteks pemajuan ekonomi hijau dan komitmen pemenuhan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 atau sering kita sebut SDG's 2030.

Khusus mengenai hubungan bilateral, Indonesia berhadapan bahwa kita terus dapat memperkokoh kemitraan strategis dengan Amerika Serikat, dan terdapat beberapa prioritas kerja sama yang ingin kita kedepankan, antara lain kerja sama ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan. Hal ini merupakan salah satu prioritas dan akan terus dijajaki, terutama dengan kemungkinan kedua negara memiliki *limited trade deal* dan mendorong investasi Amerika Serikat di sektor infrastruktur, konektivitas dan energi terbarukan. Penguatan kerja sama ketahanan kesehatan juga merupakan prioritas lainnya. Dan selain itu, kerja sama terkait dengan pertahanan, ketahanan, keamanan lintas batas dalam menghadapi berbagai macam ancaman serta pemajuan nilai-nilai bersama dan kerja sama pendidikan juga merupakan prioritas yang akan dikedepankan.

**Ibu/Bapak,**

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Izinkan sekarang saya mengundang WATAB di New York, Duta Besar Briansyahjani, untuk menyampaikan laporan singkat capaian keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB selama 2 tahun. Dan setelah itu kami mohon Pak Sekjen untuk menyampaikan mengenai evaluasi kinerja dan realisasi anggaran serta persiapan kesiapan anggaran tahun 2021.

Pak Watab, dipersilakan.

**WAKIL TETAP RI UNTUK PBB DI NEW YORK (DUTA BESAR DR. DIAN TRIANSYAH DJANI, S.E., M.A.):**

*(virtual dari Amerika, suara tidak terdengar)*

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Pak Watab, suaranya hilang.

Ya, silakan.

**WAKIL TETAP RI UNTUK PBB DI NEW YORK (DUTA BESAR DR. DIAN TRIANSYAH DJANI, S.E., M.A.):**

*(virtual dari Amerika, suara tidak terdengar)*

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Terima kasih Pak Watab, atas paparannya. Dan Pak Watab belum diizinkan untuk tidur, karena nanti kalau ada pertanyaan, maka Pak Watablah yang harus menjawab pertanyaan terkait DK PBB. Sekali-sekali enggak apa-apa.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Sekarang izinkanlah kami mengundang Pak Sekjen untuk menyampaikan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran 2020 serta persiapan kesiapan anggaran 2021. Pak Sekjen, silakan.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (CECEP HERAWAN) :**

Terima kasih.

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Nama Budaya dan Salam Sejahtera untuk kita semua.**

**Yang Saya hormati Pimpinan Komisi I DPR RI,  
Seluruh Anggota Komisi I yang Saya hormati,  
Ibu/Bapak para Hadirin yang berbahagia,**

Atas perkenan Pimpinan dan Anggota Komisi I serta sesuai dengan arahan Ibu Menteri Luar Negeri, izinkan kami menyampaikan mengenai evaluasi kinerja dan realisasi anggaran 2020 serta persiapan dan kesiapan anggaran 2021.

Yang pertama mengenai evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2020. Sepanjang tahun anggaran 2020, Kementerian Luar Negeri telah menjalankan strategi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh RPJMN dan amanat pembangunan nasional. Tentunya dalam perjalanannya melakukan berbagai penyesuaian di masa pandemi, termasuk penyesuaian anggaran Kementerian Luar Negeri. Pencapaian kinerja yang didukung oleh penggunaan anggaran tersebut, terukur melalui berbagai instrumen monitoring dan evaluasi. Nilai Kinerja Anggaran atau NKA Kementerian Luar Negeri tercatat 95,08 per data Imonev Smart Kementerian Keuangan tertanggal 22 Januari 2021. Nilai ini mencerminkan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran.

Sementara nilai indikator pelaksanaan anggaran atau IPA tercatat sebesar 10,78 per data Imonev IPA Kemenkeu 22 Januari 2021, yang mencerminkan antara lain kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

**Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota yang saya hormati,**

Izinkan saya beranjak pada bagian kedua, mengenai anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2020. Sesuai dengan DIPA Kementerian Luar Negeri tahun 2020, Kementerian Luar Negeri memiliki pagu awal sebesar Rp8.686.008.341.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 12 program kegiatan.

Sebagai dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran APBN Tahun Anggaran 2020, ditetapkan penghematan atau pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri sebesar

Rp870.499.669.000,00. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan pada Bulan April 2020 mengenai Langkah-langkah Penyesuaian Belanja yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 2020, maka besaran pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri pada akhirnya disesuaikan menjadi sebesar Rp1.083.548.834.000,00. Seiring perjalanan waktu dan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kementerian/lembaga penerima insentif atas kinerja anggaran Kementerian/lembaga Tahun 2019, Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebagai kementerian dengan capaian kinerja anggaran terbaik kedua, dalam kategori pagu sedang, sehingga mendapatkan insentif dana sebesar Rp60 miliar. Dana insentif dimaksud digunakan untuk memenuhi sebagian target pemenuhan anggaran, sehingga beban pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri menjadi berkurang.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Selain anggaran rupiah murni, Kementerian Luar Negeri juga memiliki anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini diperoleh antara lain dari biaya kekonsuleran, seperti penerbitan visa dan lain sebagainya.

Dapat kami sampaikan bahwa target penerimaan PNBP Kemlu Tahun 2020 semula adalah sebesar Rp445.148.518.000,00. Namun menurunnya permintaan Surat Perjalanan dan dokumen kekonsuleran sebagai akibat pandemi telah menyebabkan turunnya penerimaan PNBP. Untuk itu Kementerian Luar Negeri melakukan revisi target penggunaan PNBP yang pada awalnya Rp340.394.295.000,00 menjadi sebesar Rp168.497.819.000,00.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Pada akhirnya setelah mengalami berbagai penyesuaian, pagu Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp7.490.563.031.000,00. Pemotongan anggaran Kemenlu dimaksud tentunya mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan Kementerian Luar Negeri Tahun 2020, diantaranya penundaan beberapa kegiatan Pro PN, penundaan sebagian iuran kontribusi organisasi internasional sebesar Rp153.043.967.000,00. Pembatalan rencana pembelian beberapa infrastruktur diplomasi seperti gedung dan renovasi kantor di pusat. Pengurangan dan penyesuaian berbagai kegiatan fisik sebagai akibat pandemi, dan mengalihkan menjadi kegiatan virtual, termasuk beberapa kegiatan prioritas yang telah memiliki komitmen internasional. Kegiatan yang tetap dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai Pro PN pada tahun 2020 adalah kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri oleh satker pusat maupun oleh satker perwakilan RI.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Izinkan saya beranjak kepada realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun 2020. Sebagaimana telah disampaikan, pagu DIPA Kementerian Luar Negeri Tahun 2020 setelah penyesuaian adalah sebesar Rp7.490.563.031.000,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.734.205.096,00. Belanja barang sebesar Rp2.957.9125.114.000,00 dan belanja modal sebesar Rp799.232.791.000,00. Dari pagu tersebut, DIPA yang menjadi satker pusat adalah sebesar Rp2.619.675.616.0900,00 dan DIPA Satker perwakilan sebesar Rp4.870.887.415.000,00.

Berdasarkan surat perintah pencairan dana Kementerian Keuangan atau SP2D per tanggal 21 Desember 2020, dapat kami sampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan, pusat dan perwakilan adalah sebesar

Rp7.141.984.816.573.000,00 atau sebesar 95,35% dari pagu DIPA 2020 dengan rincian: realisasi belanja pegawai sebesar Rp3.603.749.138.000,66 atau 96,51% dari anggaran. Sementara realisasi belanja barang adalah sebesar Rp2.774.286.453.222,00 atau sebesar 93,82%. Sementara realisasi belanja modal sebesar Rp763.949.225.285,00 atau sebesar 95,59%. Realisasi anggaran satker pusat mencapai 96,7% yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp983.841.661.261,00 atau sebesar 90,68%. Realisasi belanja barang sebesar Rp1.252.596.060.514,00 atau sebesar 95,05%. Realisasi belanja modal sebesar Rp280.283.417.686.000,00 atau sebesar 95,11%. Sementara itu untuk realisasi anggaran satuan kerja perwakilan RI diluar negeri mencapai sebesar 94,96% dari pagu anggaran, yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 96,7%, realisasi belanja barang sebesar 92,82% dan realisasi belanja modal sebesar 95,86%.

#### **Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran dalam rangka mendukung penanganan dampak Covid-19. Dalam masa penanganan pandemi Covid-19, alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kementerian Luar Negeri adalah sebesar Rp150.850.252.000,00 dan realisasi sebesar Rp128.264.210.789,00 atau sebesar 85,03% berdasarkan *online monitoring system* Perbendaharaan Negara per 31 Desember 2020. Adapun rincian anggaran penanganan Covid untuk satker pusat sebesar Rp49.349.288.000,00 dengan realisasi mencapai Rp42.778.951.697,00 atau sebesar 86,68%. Sementara untuk satker perwakilan, pagu anggaran sebesar Rp101.500.964.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp85.485.259.092,00 atau sebesar 84,22%.

#### **Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Izin, sebagai bagian terakhir, mengenai persiapan dan kesiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021. Dapat kami sampaikan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak baik secara internal maupun dengan kementerian/lembaga terkait terus kami coba jalin secara intensif, guna memastikan agar anggaran dapat diarahkan untuk belanja yang lebih produktif serta berdampak langsung pada program kerja yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 5 prioritas politik luar negeri tahun 2021, yaitu membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau *national health security*, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan, memperkuat sistem perlindungan Warga Negara Indonesia, terus berkontribusi memajukan berbagai isu kawasan dan dunia, serta kedaulatan dan integritas wilayah.

Bertalian dengan hal tersebut, fokus penyelenggaraan rencana kerja Kementerian Luar Negeri tahun 2021 antara lain diplomasi ekonomi termasuk upaya pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19, diplomasi terkait pengadaan vaksin untuk kebutuhan Warga Negara Indonesia, tetap menjadi prioritas di tahun 2021. Perlindungan warga negara, seperti pemetaan warga negara Indonesia yang terpapar Covid-19, penyaluran bantuan kepada Warga Negara Indonesia, penguatan digitalisasi transformasi pelayanan publik dilingkungan Kementerian Luar Negeri, peningkatan promosi perdagangan, investasi dan pariwisata, oleh perwakilan kita diluar negeri, persiapan keketuaan Indonesia pada G20 pada tahun 2022 dan Asean pada 2023, serta keanggotaan INDONESIA di ECOSOC pada 2021-2023.

Sesuai DIPA Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2021, Kementerian Luar Negeri memiliki pagu alokasi anggaran sebesar Rp8.205.316.860.000,00 yang didistribusikan kepada satuan kerja pusat sebesar 36,3% atau senilai Rp2.984.812.046.000,00, sementara satuan kerja perwakilan sebesar 63,6% senilai Rp5.220.504.814.000,00. Pada

perkembangannya, Menteri Keuangan pada tanggal 12 Januari 2021 telah menetapkan penghematan (*refocussing*) dan realokasi belanja KL Tahun 2021. Untuk ini, Kementerian Luar Negeri mendapatkan penghematan pemotongan sebesar Rp131.428.017.000,00. Dengan demikian, alokasi pagu anggaran Kementerian Luar Negeri setelah penghematan adalah sebesar Rp8.073.888.843.000,00 yang pendistribusiannya untuk satker pusat sebesar Rp2.912.198.699.000,00 dan satker perwakilan sebesar Rp5.161.690.144.000,00.

Adapun distribusi anggaran setelah penghematan berdasarkan jenis belanja, terdiri dari belanja operasional sebesar Rp5.198.644.468.000,00 dan belanja non operasional sebesar Rp2.875.244.375.000,00.

Mempertimbangkan besaran pagu alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2021, dan guna mendukung pemulihan dampak pandemi Covid-19, Kementerian Luar Negeri terus melakukan penajaman program prioritas, optimalisasi anggaran, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, guna mendukung pencapaian program yang telah dicanangkan oleh Kemlu. Dalam kaitan ini Kementerian Luar Negeri memiliki 5 Pro PN Tahun Anggaran 2021, yaitu pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia oleh Satker pusat sebesar Rp50.570.000.000,00; pelayanan dan perlindungan Warga Negara di perwakilan RI sebesar Rp107.975.553.000,00; penyelesaian perundingan batas maritim sebesar Rp2.675.000.000,00; optimalisasi keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM sebesar Rp4 miliar; optimalisasi kontribusi Indonesia pada jajaran 10 negara pengirim misi perdamaian PBB sebesar Rp2.500.000.000,00.

Dalam proses perencanaan anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun 2021, pada Agustus 2020 yang lalu, kami telah mengusulkan anggaran belanja tambahan atas pagu anggaran tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.148.041.335.000,00. Namun demikian, usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,**

Memasuki tahun anggaran berjalan, Kementerian Luar Negeri akan kembali mengajukan permohonan anggaran belanja tambahan, sebesar Rp869.715.263.475.000,00, dengan peruntukan melaksanakan kegiatan bersifat mendesak dan berdampak positif terhadap dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional, diplomasi kesehatan, dan dukungan logistik sumber daya manusia kelembagaan, serta penguatan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan program dan prioritas politik luar negeri tahun 2021.

**Ibu/Bapak yang Saya hormati,  
Bapak Pimpinan,**

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenan perhatian Ibu-Bapak, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Terima kasih Pak Sekjen.

Demikianlah Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, paparan dari kami, dan kami siap untuk mendapatkan masukan dan saran dari Ibu-Bapak sekalian, dan kami mohon izin kiranya pada saat pendalaman, Pak Wamen beserta kita semua Tim, diperkenankan untuk memperkaya diskusi selama pendalaman. Dan kami juga dimohonkan izin kepada Dirjen Kerja

sama Asean untuk dapat meninggalkan ruangan, karena Beliau harus memimpin pertemuan SOM Asean-Rusia di mana Indonesia menjadi koordinator.

Demikian Ibu-Bapak yang saya hormati, terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, terima kasih Bu Menlu.

Baru saja kita dengarkan paparan Bu Menlu, kemudian ada juga paparan dari Pak Watab RI PBB di New York, dan juga Pak Sekjen Kemlu. Kami laporkan kepada Bu Menlu, bahwa saat ini sudah tergabung selama perjalanan rapat kita, Pimpinan dan Anggota Komisi I hampir sejumlah 30 orang, termasuk Pak Abdul Kharis yang sudah bergabung mendampingi kita. Dan di meja Pimpinan sudah mendaftar 10 orang, untuk memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan. Sekarang pukul 11.35 WIB, mohon pertanyaan singkat, padat. Kami persilakan untuk urutan tiga pertama, Pak TB. Hasanuddin, Ibu Christina dan Pak Dede.

**F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Terima kasih.

Sebelum acara, saya kira sudah ngobrol dengan Ibu Menlu ya, secara gamblang, dan paparan Ibu saya kira cukup komprehensif atau kaffah lah, terima kasih atas paparannya.

Semula saya tidak menyampaikan pertanyaan, tetapi saya mohon tadi dari Pak Sekjen ada optimalisasi terhadap 10 negara yang mengirimkan *peacekeeping force* atau barangkali militer observer dalam kegiatan-kegiatan PBB, keterlibatan 10 negara itu, sekian miliar. Mohon penjelasan lebih rinci, dimaksud dengan optimalisasi itu apa. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Terima kasih Pak TB.

Bu Christina.

**F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):**

Ya, terima kasih Pimpinan, saya coba singkat, tapi cukup ada beberapa hal.

**Bu Menlu,**

Selamat sekali lagi, *Co-chair Covax*, kami di sini tidak meragukan komitmen Ibu dan perjuangan Ibu terkait dengan akses kesetaraan vaksin, ini sudah sejak Bulan Mei 2020 Ibu di sini selalu membahas bagaimana membuka pintu, menata jalan dan sekarang juga hasilnya sudah mulai kita laksanakan, untuk *batch* pertama vaksinasi sudah mulai berjalan, semoga lancar terus ke depannya. Ini menjadi harapan kita bersama.

Nah dalam konteks ini, pendekatan tadi Ibu sampaikan, ada pendekatan dengan negara-negara setempat, khususnya bagi *vulnerable groups* dan diplomat luar negeri di luar

negeri ya, WNI kita. Nah, sekarang ini kan kita paham benar, kalau vaksin menjadi *game changer*, semua negara pasti butuh. Nah bagaimana kita bisa memastikan kalau WNI kita yang *vulnerable group* tadi bisa menjadi target yang juga didahulukan untuk mendapatkan vaksin? Kami tahu pasti, WNI kita di Malaysia ini termasuk dalam grup ini. Nah mereka juga apa namanya, ada di perkebunan-perkebunan, di pelosok-pelosok, nah statusnya seperti apa, khususnya untuk mereka ini, pendekatannya bagaimana, mulai kapan kita bisa melihat mulai ada *result*, untuk ketersediaan akses vaksin gratis bagi WNI kita ini.

Nah yang kedua, saya menyambut baik Pimpinan, tadi ada juga fokus ya, fokus baru terkait penguatan sistem pendataan, infrastruktur perlindungan tadi, seragam di 129 perwakilan, tentunya sebagai bentuk, saya ingat kalau Pak Utut itu selalu bilang kalau bentuk keberpihakan itu harusnya dari anggaran, begitu. Jadi belajar juga ya Pak Sturman ya, sudah setahun. Nah ini. Jadi kami mendukung soal ini, Ibu. Tapi teknisnya ini bagaimana? Karena kalau kita hanya mengandalkan aplikasi Peduli Lindungi tadi, Peduli WNI tadi, Peduli Lindungi Kominfo, Peduli WNI. Ini seperti yang kita tahu, kurang, kurang apa ya, belum banyak orang yang secara sukarela mendaftarkan dirinya dalam aplikasi ini. Banyak sekali yang belum tahu juga. Jadi langkah seperti apa yang akan kita tempuh untuk memastikan sistem ini bisa berjalan, untuk penguatan pendataan tadi.

Saya juga menyambut baik tadi, *integrated data operation center*, saya juga berbicara dengan *Indonesia Ocean Justice Initiative* ya, beberapa kali memang ABK ini kita harus punya cara-cara khusus, begitu. Salah satunya tadi, *data operation center* yang bisa diakses 24 jam oleh mereka. Ini juga kami dukung, bagus sekali.

Berbicara tentang ABK, tadi juga Ibu sampaikan di paparan, tata kelola ABK. Tidak boleh lagi ada tumpang-tindih peraturan penempatan. Kita tahu sekali Bu, ini banyak sekali kan tumpang-tindih dengan beberapa kementerian, sektor-sektor yang masing-masing punya kewenangan. Nah lalu bagaimana dengan proses rancangan peraturan pemerintah terkait ABK yang memang merupakan amanah dari Undang-undang Perlindungan WNI? Sejauh mana statusnya ini? Saya juga catat waktu itu Ibu pernah sampaikan kepada kami dengan Tiongkok, tadi ada *mutual legal assistant* sudah diangkat, *guideline* pelarungan, ini apakah sudah ada *implemented*? Itu satu. Lalu yang kedua, terkait penempatan untuk ABK kita di Tiongkok, akan memberdayakan Asosiasi kedua negara. Nah ini bagaimana *up date*-nya Ibu? Ini terakhir kali dulu kita sempat denger soal ini.

Kembali lagi ke Malaysia, jadi memang ada program recalibrasi pulang dan rekablisasi, reka, rekablisasi bekerja, untuk pekerja migran kita, jadi memang banyak yang mau pulang dengan situasi saat ini. Nah tapi untuk program yang dibuka oleh negara Malaysia ini, mereka kesulitan. Karena satu hal, mereka tidak punya akses internet. Lalu yang kedua, banyak yang buta huruf. Nah jadi peran apa yang bisa dijalankan oleh perwakilan kita, karena kalau hanya disosialisasikan, oke, silakan daftar online, ini mereka ya ketidakmampuan ya, ingin pulang, tapi tidak mampu, begitu. Jadi bagaimana, apa upaya yang bisa dilakukan oleh perwakilan kita di sana. Nah saya ingat waktu Pak Hermono *fit and proper* di sini, Dubes Hermono, salah satu target capaian Beliau adalah finalisasi MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Domestik. Nah ini semuanya perempuan, Ibu. Jadi dengan ada Ibu di sini, dengan ada saya di sini, kita-kita semua di sini, bagaimana agar ini bisa benar-benar terlaksana? *Expire* sejak 2016, ada kesulitan, nah bagaimana agar kita bisa memberikan ini sebagai payung yang sangat kita butuhkan untuk memastikan perlindungan dan penempatan pekerja migran kita di sektor domestik di Indonesia, eh di Malaysia.

Nah yang terakhir soal Amerika Serikat. Jadi salah satu tadi fokus rencana kerja 2021 saya catat juga adalah peningkatan promosi perdagangan. Nah sebetulnya kami kemarin senang ya dengan Dubes kita yang Pak Lutfi itu, karena kami pikir, oh bisalah membuka jalan meningkatkan perdagangan kita, neraca perdagangan kita. Tapi sekarang kan karena sudah diberikan tugas baru, nah lalu bagaimana ke depannya, siapa yang kira-kira, apakah sudah



proses untuk penggantian ini, untuk nantinya *fit and proper* di kami, ini sudah mulai dilakukan? Karena kalau memang janji Presiden Biden dulu tentang peningkatan upah federal dan segala macam, kita rasa ada potensi untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, selanjutnya Pak Dede.

Siap-siap Pak Yan dan Pak Mukhlis.

**F-PDIP (DEDE INDRA PERMANA, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan, Pak Riefky, yang sebentar lagi sudah pamit sebenarnya kita sangat kehilangan, bisa mengayomi kita semuanya, Pak Riefky ini, konkrit orangnya.

**Bu Menlu yang Saya hormati dan seluruh Anggota Komisi I,**

Dalam beberapa waktu lalu, ada seminar yang diadakan oleh Kontras dalam acara Menagih Perlindungan Negara dalam Kasus Penghilangan Paksa WNI di Malaysia. Dan kebetulan waktu itu diikuti oleh anggota Komisi I, Pak Effendi Simbolon. Beliau tadi juga sudah komunikasi, hal ini yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana upaya hukum yang sudah dilakukan oleh Kemenlu, dalam menangani penghilangan paksa pada tanggal 26 Juni 2018 yang bernama Ruth Sitepu, beserta suaminya. Suaminya Warga Negara Malaysia dan beberapa Warga Negara Malaysia yang lain. Itu saja Bu Menlu, yang jelas apa yang menjadi tindak lanjut Kontras maupun kegiatan di Kontras ini, ingin ditanyakan oleh Bu Menlu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Terima kasih Pak Dede.

Selanjutnya Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

Terima kasih.

**Pimpinan yang Kami hormati,  
Rekan-rekan Anggota Komisi I,  
Bu Menlu, Pak Wamenlu dan seluruh jajaran Kemenlu yang kami hormati,**

Saya mungkin yang pertama terkait dengan penanganan ABK. Saya ingin tahu, perkembangan penanganan ABK Xing 629 yang sampai dengan saat ini, saya pikir kita belum mengikuti perkembangan terakhir, karena saya ikuti kasusnya ditangani Bareskrim, dan pada saat diminta untuk ada saksi dari kapal tersebut, yang bisa dihadirkan untuk memenuhi syarat-syarat dalam penyidikan, ternyata sampai dengan saat ini belum ada kepastian apakah pihak

China mampu dan siap untuk membantu memfasilitasi para saksi itu untuk dihadirkan dalam pemeriksaan di Bareskrim, ataukah kasus ini sudah berhenti dalam proses penyidikan?

Kemudian yang kedua terkait juga dengan ABK di kapal Lu Huang Yuan Yu 118, kasus kematian ABK. Nah ini saya ingin untuk mendapatkan penjelasan detail dari Bu Menlu terkait penyelesaian masalah ABK kita.

Kemudian yang berikut, terkait dengan vaksin. Pertama, kita semua berikan apresiasi atas kinerja Bu Menlu dan teman-teman di Kemenlu, sehingga proses diplomasi vaksin kita, bisa kita peroleh dengan cepat. Dan di tahun 2021, walaupun dengan berbagai macam tantangan, masyarakat kita sudah bisa terakses dengan vaksin Sinovac. Dan saya lihat ada beberapa rincian yang tadi sudah dipresentasikan juga oleh Bu Menlu dalam negosiasi vaksin, kita berharap ya vaksin Sinovac ini karena dari uji klinis yang dilakukan dan juga proses vaksin yang telah juga dilakukan oleh China ya, saya lihat belum terlalu efektif karena China masih dibawah 60%. Sedangkan kita 65,3%.

Nah vaksin ini dari informasi BPOM yang kita peroleh, bahwa vaksin ini hanya memberikan dampak antibodi. Tetapi ada dampak-dampak lain yang belum teratasi oleh vaksin tersebut. Oleh sebab itu sangat pro-kontra di publik terkait dengan perkembangan vaksin Sinovac.

Nah saya pikir sebenarnya strategi vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah, mungkin seharusnya dari pertama, Pemerintah sudah bisa membangun komunikasi yang positif dengan BPOM sehingga *image* yang terbentuk di publik itu benar-benar tidak memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk di vaksin, karena menyangkut dengan tingkat keberhasilan. Nah akhirnya sekarang banyak masyarakat, jangankan masyarakat Bu, kami di DPR ini saja masih mikir-mikir Bu, untuk vaksin. Saya pikir Bu Menlu dengan teman-teman di Kemenlu juga mungkin banyak yang belum di vaksin juga.

Oleh sebab itu saya pikir vaksin ini kalau sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, seharusnya di jajaran Pemerintah, harus menunjukkan itu dulu. Melakukan vaksin, kemudian tingkat keberhasilan, apalagi vaksinnya saya ikuti harus dua kali, vaksin pertama dan setelah 14 hari dilakukan lagi vaksin kedua. Nah ini kita harus mengukur tingkat keberhasilan. Sehingga publik kita benar-benar yakin, dan target vaksinasi yang kita capai. Kemarin saya hitung, Bapak Presiden targetkan, dalam satu hari, bisa mencapai 1 juta orang. Nah harapan saya, bahwa kalau dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi melalui kebijakan Pemerintah dan langkah-langkah awal yang memang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan vaksinasi ya, baik yang sudah melalui relawan, tapi juga melalui kementerian/lembaga di Jakarta, maka saya yakin publik sendiri akan mau untuk di vaksin. Tetapi sampai saat ini, *image* di masyarakat, bahwa vaksin ini kita hanya berikan untuk masyarakat luas. Tetapi kalangan-kalangan tertentu, tidak menjangkau vaksin Sinovac. Nah oleh sebab itu ada rasa ketakutan, ada yang ingin di vaksin, dan ada yang tidak ingin di vaksin, nah itu.

Jadi saya pikir, ya mudah-mudahan Bu Menlu, kita Komisi I menunggu kapan teman-teman di Kemenlu ini bisa di vaksin, untuk kita juga mengukur tingkat keyakinan. Dari Kementerian Luar Negeri sendiri yang melakukan diplomasi vaksin, itu. Itu yang menjadi catatan dari saya. Karena Pak Rizki saja Bu, disamping saya ini, kalau disuruh di vaksin besok, mungkin dia belum berani juga, Bu. Jadi ini sebenarnya yang mungkin menjadi

**F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.):**

Saya siap, saya siap. Nanti sore di vaksin.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

Sudah siap? Jadi saya pikir mungkin ini yang menjadi catatan kami.

Nah kemudian yang berikut Bu Menlu, yang terakhir dari saya, terkait dengan beberapa informasi dan masukan-masukan kepada kami terkait kesejahteraan diplomat-diplomat kita, termasuk dengan staf diplomat, tapi juga *local staff*. Nah mungkin ke depannya, perlu juga mendapat perhatian, dan ada peningkatan kesejahteraan terhadap mereka yang ditugaskan diberbagai kedutaan dan juga KJRI atau Konsulat yang ada di luar negeri. Nah kenapa demikian? Karena kami mendapati informasi bahwa baik *local staff* maupun staf KBRI dan KJRI itu banyak yang tidak bisa menangani persoalan-persoalan keseharian mereka dan kebutuhan mereka dalam sebulan. Terutama misalnya soal tunjangan perumahan, kontrak rumah dan lain-lain, karena tingkat kemahalan yang ada, akhirnya ini juga membebankan staff, dan tentunya akan mengganggu efektivitas kinerja dari staff-staff Kemenlu yang ada di seluruh kedutaan di luar negeri, tapi juga *local staff* yang diperbantukan diberbagai macam kedutaan dan KJRI. Saya pikir ini yang menjadi perhatian dan mudah-mudahan ke depannya kita harapkan sudah masuk dalam rencana Bu Menlu untuk memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan kinerja dari para KBRI kita di seluruh negara-negara sahabat.

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
**Salam Sejahtera untuk kita sekalian.**

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih Pak Yan.

Jadi ada juga yang mengatakan, ini Pemerintahnya cerdas, begitu. Karena kalau semua yakin semuanya berebut, malah, karena stoknya enggak ada. Jadi justru ada yang takut-takuti ini, langkah cerdas, begitu. Biar tidak berebut, begitu. Karena menunggu ketersediaan. Jadi Pak Yan jangan salah ini, kita harus mengartikan ini langkahnya cerdas banget itu. Jadi kalau pada takut kan, yang berani-berani dulu, itupun stoknya enggak cukup, begitu. Jadi jangan terlalu serius dengan apa namanya, ketakutan-ketakutan. Karena vaksin itu resikonya Cuma jadi kebal banget, atau kebalnya enggak terlalu kebal banget, kira-kira itu. Jadi ini langkah cerdas Pemerintah, saya kira.

Bu Menteri juga senyum-senyum. Baik, mestinya ada penanya berikutnya, tapi Pak Anton, Pak Anton enggak ada, Pak Mukhlis, silakan. Persiapan, Pak Farhan.

**F-PDIP (DRS. MUKHLIS BASRI):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***  
**Selamat Siang.**

**Yang Saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi I,**  
**Yang Saya hormati Ibu Menlu dan Wamenlu, seluruh jajarannya.**

Yang pertama, saya mengucapkan selamat atas capaian kinerja, nomor 2 terbaik diluar jasa, buat kementerian ya. Dapat insentif Rp60 miliar. Jarang ini Bu ya.

Selanjutnya beberapa waktu yang lalu, ada warga di dapil saya ini Bu, sebagai ABK, meninggal dunia. Meninggal dunianya 9 Juni. Bayangkan Bu, baru diterima oleh keluarganya tanggal 16 Januari. Jadi setengah tahun lebih. Jasadnya, mayatnya tidak jelas, tapi *alhamdulillah* masih bisa diterima oleh keluarganya. Kenapa saya sampaikan di forum ini, walaupun pihak keluarganya sudah menerima? Saya kira persoalan ABK yang seperti ini mungkin bukan hanya terjadi yang dialami warga di dapil saya ini saja, tapi mungkin ada juga ABK-ABK yang mengalami hal yang sama. Nah harapan kami, jangan sampai terjadi lagi atau diulangi kasus-kasus seperti ini. Bagaimana supaya artinya peran dari pada Ibu beserta jajaran ini untuk hal-hal masalah yang dialami oleh warga kita, mereka kan keluar negeri menjadi ABK itu untuk menghidup keluarga mereka. Tapi justru mereka mengalami satu musibah, begitu. Ini saya sampaikan Bu, nama dari ABK ini adalah Apriansyah. Adapun dia adalah ABK dari pada Kapal Asing Pu Yuan 721. Beliau ini warga Kecamatan Ngaras, Lampung Barat, Provinsi Lampung, Indonesia. Kapalnya yaitu yang membawa Beliau yaitu PT. Baruna Jaya Sentosa, Lampung. Jadi sekali lagi harapan saya, jangan sampai terjadi untuk ke depan, hal-hal seperti ini, jadi supaya Ibu beserta staff jajarannya untuk lebih aktif lagi ya, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan ABK yang mereka sengaja kata saya tadi, mencari kehidupan untuk kesejahteraan keluarga mereka.

Saya kira itu saja Bu, terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

***Walaikumsalam.***

Selanjutnya Pak Farhan, persiapan Pak Rizki.

**F-NASDEM (MUHAMMAD FARHAN):**

Terima kasih Pak Pimpinan.

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Para Anggota Komisi I yang terhormat,  
Ibu Menteri beserta jajaran,**

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama masalah Amerika Serikat dengan pemerintahan yang baru, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran, bagaimana sebetulnya bentuk kerja sama kita yang lebih riil, mengenai penanganan masalah Rohingya, Laut China Selatan, kemudian komitmen 2 miliar dollar untuk LPI yang sudah disampaikan oleh satu satu eksekutif mereka yang bernama Adam Boller yang sudah 2 kali berkunjung ke Istana Bogor.

Masih soal Amerika Serikat juga, perlu kiranya kita menyampaikan sikap kembali, penegasan yang lebih kuat tentang posisi pembukaan US Embassy di Yerusalem.

Berikutnya, mengenai anggaran yang disampaikan oleh Pak Sekjen, kita melakukan penundaan iuran di keanggotaan lembaga internasional, mohon dijelaskan, lembaga mana saja yang kita tunda, dan apa dampaknya terhadap hubungan multilateral kita, di lembaga-lembaga tersebut. Dan ada Rp4 miliar yang dianggarkan untuk optimasi kita di keanggotaan Dewan HAM. Mungkin bisa lebih dijelaskan, apa saja yang kita lakukan di Dewan HAM PBB ini. Dan selanjutnya, jadi optimasi tersebut untuk apa.

Selanjutnya mengenai insiden tanker Iran, di mana Iran kemudian mempertanyakan tentang keabsahan kita melakukan penyitaan terhadap kapal tanker mereka, yang karena kita ketahui diduga melakukan transfer ilegal, BBM di tengah laut, itu perlu kita tangani bersama agar jangan sampai menjadi sebuah insiden internasional.

Dan yang terakhir, apa yang Bu Menteri dan seluruh jajaran bisa sampaikan kepada kami karena kita sebagai mitra tentu saja membelikan bantuan dan kemitraan yang optimal untuk optimalisasi diplomasi vaksin Indonesia dan dunia internasional.

Terima kasih.

***Wabillahitaufik Walhidayah.***

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

***Walaikumsalam.***

Selanjutnya Pak Rizki.

Kemudian persiapan dari virtual, Pak Ludwig,

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Daftar Pak, sebelum virtual.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Oh, oke, ya.

Sebelum virtual, ada Pak Tamliha, ada Pak Sturman, dan satu lagi ada Pak Iqbal. Oke, Pak Rizki, silakan Pak Rizki.

**F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):**

Terima kasih Ketua.

Berlawanan dengan Pak Yan, Bu Menteri, saya siap divaksin. Justru kami dari Fraksi Partai Demokrat, tadi juga Pak Ketua sudah menggarisbawahi, bagaimana Pak Jenderal? Siap Bu, justru kami dari Fraksi Partai Demokrat ingin memastikan bahwa kepastian vaksinasi ini bisa didapatkan untuk seluruh warga negara di Republik Indonesia, baik itupun yang ada di luar negeri. Karena kalau kita mengacu kepada, saya baca di media beberapa waktu lalu, perjanjian dalam *International Health Regulation* menyatakan bahwa vaksinasi pada suatu daerah merupakan kebijakan dari daerah tersebut. Jadi yang menjadi *concern* saya adalah apakah 3 juta, dari mengacu data dari Kementerian Luar Negeri, 3 juta Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, di mana 90% dari pada mereka adalah tenaga kerja Indonesia dan juga pelajar juga akan mendapatkan akses yang sama terhadap vaksinasi

tersebut. Dan apakah ini sudah merupakan atau masuk dalam *road map* Pemerintah terkait dengan vaksinasi? Dan kalau misalnya itu merupakan kebijakan dari negara-negara sahabat kita, apa saja upaya yang telah dilakukan dari Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bahwa warga negara kita di luar sana bisa mendapatkan akses kepada vaksinasi, mungkin ini lagi-lagi Pak Direktur Perlindungan Luar Negeri, WNI, Pak Yudha, saya tahu Beliau pro aktif, ini kita untuk memberikan rasa lega Bu Menteri kepada Warga Negara Indonesia terutama para TKI dan pelajar yang berada di luar sana.

Yang enggak kalah pentingnya Pak Ketua, di luar dari Covid-19 adalah tadi *statement* Bu Menteri terkait dengan UNCLOS. Ini saya ingin mengacu kepada pernyataan pers dari Kemlu yang menyatakan bahwa akan ada upaya diplomasi dengan negara-negara tetangga terkait dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Ini juga saya mencoba untuk menyeleraskan pembahasan di DPR terkait dengan adanya rancangan perubahan Undang-undang tentang Landas Kontinen, yang Pansusnya sudah dibentuk di DPR RI. Kami hanya ingin meminta masukan dan catatan-catatan penting, Bu Menteri, apa yang kami bisa bawa dan juga menjadi gambaran untuk kami yang penting untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang ini, terutama dari sisi hubungan luar negeri. Dan hal yang paling penting adalah terkait dengan pengajuan klaim Indonesia atas landas kontinen lebih dari 200 mil dari garis pangkal lurus kepulauan, apakah ada catatan-catatan penting untuk kami, dan apakah ada tanggapan dari negara-negara tetangga Indonesia?

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

Terima kasih.  
Pak Tamlaha, silakan.

**F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., MS):**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

Terima kasih Pimpinan.

**Bu Menlu yang Saya hormati, beserta seluruh jajaran,**

Saya tidak meminta jawaban lisan, tapi tertulis. Realisasi belanja modal sebesar Rp 483.665.807.599,00 atau 95,86% menyangkut satker perwakilan di luar negeri tahun anggaran 2020.

Kemudian saya juga minta jawaban tertulis, penghematan atau pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp131.428.017.000,00. Saya berharap ini bisa dirinci secara tertulis, berapa belanja pegawai, berapa belanja barang dan berapa belanja modal. Ini kami perlukan secara tertulis untuk sinkronisasi jika terjadi rapat Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan. Itu saja Bu, karena ini membahas anggaran ya saya tanya anggaran.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

***Walaikumsalam.***

Pak Sturman, lanjut.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Yang Saya hormati Bapak/Ibu Anggota Dewan yang Saya banggakan,  
Ibu Menteri Luar Negeri dan jajarannya yang luar biasa,**

Saya selalu bangga kalau Rapat Dengar Pendapat dengan Menlu ini karena pakaiannya bagus-bagus, saya lihat. Rapih, seragam, luar biasa. Cerminan disiplin yang luar biasa. Jadi wajar kalau tadi mendapatkan Rp60 miliar itu ya Bu, saya anggap itu seharusnya nomor 1 bukan nomor 2. Luar biasa. Saya sangat bangga untuk ini. Karena tidak banyak jajaran yang seperti ini, yang menggunakan seragam yang sama, dan dasinya banyak juga yang warna merah. Dan kuning juga ada kuning. Ya biru juga boleh.

Saya tertarik sekali dengan vaksin, Ibu, yang memang Covid-19 ini sangat luar biasa dampaknya dan pengaruhnya kepada dunia, khususnya kepada negara Indonesia. Banyak yang masuk bui, banyak yang harus diganti posisinya karena bicara vaksin ini, atau bahkan miskin, yang paling banyak. Karena keterbatasan kehidupan. Saya ingin bertanya, karena Pak Yan tadi pertanyaan masalah vaksin, dia ketakutan, kalau saya karena sudah umur 20, eh 26, 62 tahun, jadi saya katanya sih enggak boleh lagi divaksin secepat itu. Tadi Ibu mengengrekan, memaparkan prioritas. *Opo genre iku opo?* Tahu, tahu, tentang prioritas yang diberikan vaksin. Pertama, petugas-petugas tenaga kesehatan, kemudian para pejabat-pejabat negara yang berkomunikasi dan sebagainya. Saya tidak melihat Ibu mengatakan bagaimana dengan Anggota DPR yang juga berhubungan dengan masyarakat, yang berhubungan dengan dapil. Kemudian saya enggak melihat tadi Ibu memaparkan, dari Kementerian Luar Negeri ini sudah semua atau belum yang divaksin? Karena tadi agak ditanya sama Pak Yan juga tadi. Mudah-mudahan sudah semua. Kalau kita memang jujur di sini, DPR secara kelembagaan belum ada yang divaksin. Kalau perorangan, saya enggak tahu. Ya Pimpinan, belum ada ya? Tapi saya tertarik dengan yang dikatakan Bapak Ketua tadi, memang dikondisikan seperti itu, sehingga ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga enggak semua suka atau enggak semua enggak suka, sehingga bisa bertahap. Apakah itu betul atau tidak, mungkin Ibu bisa menjawabnya nanti. Karena saya tergelitik dengan itu.

Kemudian Ibu, vaksin juga, saya menarik sekali tadi, photo antara Bapak Presiden kita dengan Bapak Presiden Amerika, Joe Biden, coba di *show*-kan dulu. Mana, operator? Saya sangat suka dengan photo itu. Boleh? No. Nah ini, Ibu. Ini kan sangat rawan sebetulnya kalau kita tunjukkan ke publik. Kita menjaga protokol kesehatan, terus kita tonjolkan di sini. Menurut saya mbok ya disimpan saja photo ini, mbok jangan ditongolin, gitu lho Bu. Supaya enggak ada berpresepsi apapun. Lho kalau menurut protokol kesehatan, ini sudah jauh dari pada protokol kesehatan. Menurut saya, mbok disimpan saja, untuk apa, enggak usah ditongolin lah di DPR, gini-gini. Karena banyak orang yang sampai acaranya dibubarkan sampai dihukum hanya karena masalah protokol kesehatan ini. Jadi mungkin enggak perlu kita tongolin lagi Bu, saran saya ini Bu.

Yang berikutnya, tentang ABK yang disampaikan beberapa teman tadi. Ibu mengatakan, ABK itu kita lindungi secara komprehensif dengan menggunakan MoU, pemanfaatan perjanjian hukum dan seterusnya dan seterusnya. Tapi faktanya, masih banyak

ABK kita yang bermasalah di sini. Selain yang Ibu katakan tadi, bagaimana pengawasan yang harus kita lakukan? Baik dari jajaran Kemenlu dengan mungkin mitra-mitra yang lain, agar tidak terjadi hal seperti ini dan terus-menerus.

Yang berikutnya tentang Laut Cina Selatan, kita ke bawah lagi, Laut Natuna. Laut Natuna ini sepanjang tahun sebenarnya bermasalah dengan nelayan-nelayan asing. Karena apa? Kekuatan TNI AL di sana pun terbatas. Nelayan kita juga pada musim-musim tertentu, seperti ini misalnya, mulai November sampai dengan Februari, sangat sulit di sana karena tingginya ombak. Bagaimana kerjasama Kemenlu dengan Kementerian Pertahanan atau dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar keberadaan nelayan kita di sana tetap ada. Tahun lalu sempat dibawa nelayan-nelayan dari Pantura itu ke sana tapi faktanya tidak menyelesaikan masalah apa pun. Karena sifatnya mereka pendatang dan kemungkinan untuk secara ekonomis nggak cocok untuk di sana, sehingga menurut kami perlu ada, karena di sini ada dua ini, adalah mitra kerja dengan Komisi 1, Bu. Bagaimana kedepannya, kayak apa ini? Apakah perlu kehadiran Angkatan Laut sana setiap saat atau bagaimana? Sehingga kitapun di Komisi I bisa mendukung mereka, dengan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yang ketiga Bu, tentang masalah warga negara kita yang di luar negeri, ada pertanyaan dari teman-teman sebenarnya bagaimana sih cara penanganan anggota atau warga kita khususnya bermasalah pidana di luar negeri? Saya di Dapil Kepulauan Riau ada seorang bapak yang berbisnis usaha pakaian bekas dari Singapura, kemudian ditangkap karena dinyatakan menggunakan uang palsu. Sampai sekarang pun keluarganya masih menghubungi saya, bagaimana penyelesaiannya. Saya yakin Ibu tahu data itu, karena nggak banyak yang yang bermain uang palsu di Singapura itu orang Indonesia. Ada datanya. Bagaimana sebenarnya penanganan itu, agar masyarakat, walaupun memang kita mematuhi hukum negara setempat, tapi paling tidak ada pendampingan atau membuat keluarganya untuk lebih berharap banyak kepada negara kita.

Saya kira itu Bapak Pimpinan, Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):**

***Walaikumsalam.***

Pak Iqbal, silakan.

**F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Komisi I,  
Yang saya hormati Ibu Menteri, Wakil Menteri dan seluruh jajaran dari Kementerian Luar Negeri,**

Pada kesempatan ini saya tidak menanyakan tentang anggaran, karena tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan sebelumnya. Yang pertama tentu saya mengapresiasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenlu. Yang pertama dalam konvensi untuk mendukung kemerdekaan Palestina, di tengah saat ini kita tahu negara-negara di Timur Tengah sudah melakukan kerjasama dengan Israel tapi Indonesia masih konsisten memperjuangkan Palestina, kemerdekaan Palestina, itu saya apresiasi sekali Bu.



Yang kedua saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan vaksin-vaksin dari negara-negara asing dan sudah berhasil, sudah datang ke kita vaksin dari negara Cina.

Yang kedua terkait dengan konflik Laut Cina Selatan, tadi rekan-rekan sudah menyampaikan, kita tahu saat ini terjadi ketegangan antara Amerika dengan China mengenai Laut Cina Selatan ini. Dan tentu ini berhubungan dengan kepentingan Indonesia terhadap stabilitas kawasan. Tetapi di sisi lain, kita tahu juga kita masih menghadapi persoalan perbatasan dengan negara Cina yaitu tentang Zona Ekonomi Eksklusif di landasan kontinen di lepas pantai Pulau Natuna. Dan kita juga tahu bahwa negara China saat ini sudah membuat peraturan untuk memberikan izin bagi kapal penjaga kawasannya untuk menembak, membolehkan untuk memeriksa dan menembak kapal negara lain yang memasuki wilayah perairan China di laut China Selatan. Padahal di sisi lain, kita tahu masih terjadi perdebatan. Saya menilai kalau saya melihat ini, perjanjian yang sudah kita lakukan, melalui pengadilan internasional itu dari 2016 dan saat sampai saat ini belum ada hasilnya Bu, masih saya melihat masih terkatung-katung. Dan saya menilai, kita ini terlalu lembek dengan negara Cina. Di satu sisi negara Cina sudah membangun infrastrukturnya di dekat Kepulauan Natuna. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di Kementerian Luar Negeri untuk menghadapi tentang persoalan perbatasan ZEE tadi, terutama di tahun 2021 ini? Apakah kita tetap menunggu, walaupun kita bukan penggugat di sini, atau ada langkah-langkah yang kita mengklaim bahwa itu kawasan kita? Karena kalau ini kita biarkan, maka kita tahu bahwa negara China perlahan-lahan akan mengklaim, dia tidak akan mau melepaskan Zona Ekonomi Eksklusif itu sampai kita menyerah kepada peraturan yang ditetapkannya sendiri.

Nah saya hanya itu yang ingin saya sampaikan, semoga ada langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bahwasannya itu hak dari kita. Dan tidak boleh Cina mengklaim bahwasannya itu hak dari perairan mereka.

Saya kira itu Pimpinan terima kasih, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, terima kasih.

Selanjutnya rekan-rekan anggota Komisi I yang ada di via zoom, kami persilakan Pak Lodewijk, siap-siap Pak Dave. Suaranya, Pak Lodewijk, tidak terdengar.

**F-PG (I. LODEWIJK F. PAULUS):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Lanjut Pak.

**F-PG (I. LODEWIJK F. PAULUS):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, selanjutnya dua terakhir dari anggota, Pak Dave Laksono, kemudian Pak Effendi Simbolon. Terdengar, jelas.

**F-PG (DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, terima kasih Pak Dave.

Selanjutnya yang terakhir, Pak Effendi Simbolon.

**F-PDIP (DRS. EFFENDI MS SIMBOLON, M. IPOL.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, terima kasih Pak Effendi.

Untuk

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

Izin tambahan, Pimpinan,

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Dari siapa?

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

Fisik.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Oh Pak Yan.

Silakan, Pak Yan.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

Terima kasih Pimpinan, singkat.

Saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan terkait dengan masuknya 153 WNA Cina pada tanggal 23 Januari kemarin, dengan status yang 150 orang mendapatkan izin tinggal sementara dan 3 orang diplomat. Nah ini mohon untuk tambahan penjelasan dari Bu Menlu, tujuannya mereka ke Indonesia dalam rangka apa? Karena di tengah-tengah situasi kebijakan Pemerintah melakukan PSBB ketat yang diperpanjang sampai dengan 8 Februari.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, terima kasih.

Demikian Ibu, ini sekitar 10 penanya Anggota Komisi I baik secara fisik maupun virtual. Sekarang pukul 12.35 WIB, mudah-mudahan bisa dijawab secara komprehensif dan kita bisa masuk ke kesimpulan dan rapat bisa ditutup sebelum jam 1.

Kami persilahkan.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Baik, terima kasih.

**Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi I yang terhormat,**

Terima kasih banyak atas pertanyaan, saran, yang saya kira sangat substantif dan juga cukup banyak jumlahnya. Izin kami menyarankan Pimpinan, bahwa untuk isu yang terkait dengan anggaran, Pak Sekjen dan Pak Dirjen Multilateral akan menanggapi. Kemudian untuk isu perlindungan, Direktur PWN akan menanggapi, sementara untuk panja terkait dengan ZEE, Pak Dirjen HPI yg akan menanggapi. Dan tiga isu tersebut dapat disampaikan secara terbuka, sementara isu lain yang terkait dengan masalah Amerika, undang-undang *coast guard*, vaksin, Jerman, dan sebagainya, kami mohon izin untuk dilakukan pendalaman secara tertutup.

Apabila disetujui maka kami mohon Pak Sekjen untuk memulai diskusi secara terbuka mengenai masalah anggaran, terima kasih.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (CECEP HERAWAN) :**

Terima kasih Bu Menlu.

Izin, Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati, izinkan kami untuk memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan, dibantu nanti oleh Pak Dirjen Multilateral.

Untuk Pak TB Hasanudin, terima kasih banyak Bapak, sebetulnya optimalisasi Pro PN ini dimaksudkan untuk terus mempertahankan postur Indonesia sebagai 10 negara besar penyumbang misi pemeliharaan perdamaian. Ada rangkaian kegiatan pendekatan maupun dengan berbagai stakeholders, nanti mungkin Pak Dirjen Multilateral akan memaparkan kegiatan-kegiatannya, Bapak.

Demikian juga untuk Farhan, izin nanti Pak Dirjen Multilateral akan memberikan jawabannya. Sementara untuk Pak Yan, terima kasih banyak Pak Yan, terima kasih untuk senantiasa memberikan perhatian kepada kesejahteraan staff Kementerian Luar Negeri termasuk yang di perwakilan.

Terkait dengan TSR ataupun tunjangan sewa rumah, memang selama ini tunjangan sewa rumah masuk kepada komponen belanja pegawai. Namun sejalan dengan inisiatif dari Kementerian Keuangan untuk membuat Peraturan Pemerintah terkait dengan fasilitas, gaji, dan tunjangan, maka komponen untuk tunjangan sewa rumah disarankan nantinya menjadi

belanja barang dalam bentuk fasilitas sewa rumah. Jadi fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah. Dalam kaitan ini kami sendiri sekarang sedang mencoba menyusun, karena selama ini tunjangan sewa rumah ini dikaitkan dengan besaran angka tunjangan penghidupan luar negeri, 20 % dari tunjangan yang diterima. Tidak melihat kepada market value dari berapa sih harga sewa rumah yang ada di negara itu pada saat ini. Sehingga sulit sekali memang untuk mengejar pertumbuhan nilai sewa dari properti ataupun apartemen atau rumah, karena gaji ataupun tunjangan tidak setiap tahun mengalami kenaikan. Untuk ini kami sedang mencoba melakukan kajian, fasilitas rumah ini dikorelasikan dengan besaran nilai pasar pada saat kita membuat perhitungan. Dan kedepannya kita coba, ini akan kita terus koordinasikan dengan teman-teman di kementerian/lembaga lainnya. Tetapi ke depan memang kita akan coba sesuai saran Kementerian Keuangan, merubah tunjangan menjadi fasilitas sewa rumah yang berasal dari belanja barang.

Terkait dengan pegawai setempat, terima kasih Pak Yan untuk mengangkat isu pegawai setempat. Memang saat ini kami juga sedang melakukan peninjauan izin prakarsa untuk menyusun Peraturan Presiden terkait dengan hak-hak keuangan pegawai setempat. Mudah-mudahan kalau ini sudah kita coba luncurkan, kita memiliki dasar hukum yang lebih kuat terkait dengan hak-hak keuangan daripada pegawai setempat yang ada di perwakilan kita di luar negeri.

Terkait dengan Pak Tamliha, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya, mungkin untuk tadi data-data yang diminta akan segera kami berikan ke Bapak secara tertulis sesuai permintaan, namun izinkan saya memberikan gambaran mengenai pemotongan Rp131 miliar ini berasal dari belanja barang dan belanja modal, Bapak. Belanja barang sekitar Rp101 miliar dan belanja modal sekitar Rp30 miliar. Belanja barang kami coba sisir berbagai kegiatan di awal semester pertama khususnya kuartal pertama, yang karena situasi masih pandai, kemungkinan besar belum bisa kita laksanakan secara optimal sehingga diharapkan ini tidak terlalu mengganggu dari kegiatan Kementerian Luar Negeri pada gilirannya nanti. Rp 131 miliar ini pemotongan dari belanja ataupun anggaran pusat sebesar 55,24% dan anggaran dari perwakilan sebesar 44,75%.

Untuk realisasi belanja modal tahun anggaran 2020, nanti akan kami sampaikan rinciannya Bapak, tetapi mayoritas memang di perwakilan yaitu sebesar Rp484 miliar lebih, sementara di pusat sebesar Rp279 miliar lebih. Dan komponen terbesar belanja modal pusat yaitu mencapai Rp226 miliar adalah untuk membayar cicilan pengadaan gedung melalui pihak ketiga, perbankan, nah memang mayoritas kami membayarkan cicilan per tahunnya Bapak, sebesar Rp226 miliar per tahun. Tapi data lengkapnya akan kami sampaikan.

Terima kasih banyak Pimpinan.

Seizin Pimpinan, Pak Dirjen Multilateral menambahkan untuk pertanyaan Pak Hasanuddin dan Pak Farhan.

Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL KERJA SAMA MULTILATERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (FEBRIAN ALPHYANTO RUDDYARD):**

Terima kasih, Pak Sekjen.

Izinkan Bu Menlu dan Pak Pimpinan, saya ingin memberikan gambaran apa yang kita lakukan dalam kerangka optimalisasi peran kita untuk menjadi tetap menjadi 10 besar, Pak Hasanuddin. Jadi *challenge* kita saat ini dalam isu *peacekeeping* adalah ada *refocussing* dari

jumlah pasukan yang dikirim oleh PBB, di mana jumlah kontingen menjadi lebih kecil dan tentunya tidak akan ada pengiriman baru tapi lebih pada rotasi dari pengiriman yang ada. Nah ini menjadi *challenge* kita.

Oleh karena itu salah satu program diatas kita dapat tetap berada di dalam 10 besar. Kalau Bapak ingat, beberapa tahun lalu program kita mendapatkan 4000 Pak. Tapi saat ini nampaknya tidak realistis lagi tetap 4000, karena jumlah total keseluruhan pasukan perdamaian PBB turun semua. Nah oleh karena itu upaya kita adalah tetap menjadi anggota 10 besar. Saat ini kita mengirim paling tidak 2800 dan berada pada peringkat 8.

Nah beberapa hal yang kita lakukan Pak, salah satunya adalah melakukan program *co-deployment* dengan negara yang lain. Jadi bukan Indonesia sendiri. Tapi bagaimana bisa memanfaatkan *co-deployment* dengan negara lain. Sehingga dengan demikian kita bisa menyalurkan pasukan kita yang sudah di luar, tidak perlu dikembalikan.

Yang kedua juga kita bekerjasama dengan beberapa negara, Ethiopia dan Jepang, untuk mengadakan suatu kegiatan persiapan *UN Minister Meeting on Peacekeeping Operation* ini menjadi *ground* dari apa kegiatan mahkota kita tahun ini, untuk membuat *Mission*, eh *Minister Meeting Peacekeeping Operation* berjalan dengan baik. Karena ini nanti akan berujung kepada keputusan politik sebagaimana PBB melihat fungsi dari *peacekeeping operation* yang selama ini berfungsi sebagai *flagship* dari PBB. Itu yang yang terkait dengan *UN Peacekeeping*.

Terkait dengan pertanyaan Pak Farhan, mungkin ini lebih kepada pemotongan anggaran kontribusi ... kalau enggak salah. Dan memang kita lihat selama ini berdasarkan situasi yang kita hadapi saat ini, kita telah melakukan pemotongan pembayaran, bukan pemotongan, penundaan sebetulnya, pembayaran 97 organisasi internasional dari total 200 organisasi internasional yang kita ikut. Jadi yang kita bayar sekitar 110-an Pak, Nah kita tidak mengenakan kriteria yang ditunda tapi kita mengenakan kriteria yang dibayar. Jadi dibalik. Jadi kita hanya membayar berdasarkan 3 kriteria, pertama yaitu organisasi internasional yang bermarkas di Indonesia, itu tentunya harus kita bayar.

Yang kedua, organisasi internasional di mana kita ikuti pencalonan, apakah menjadi ketua, apakah menjadi *executive body*, ataupun wakil ketua dan yang lain. Seperti menjadi anggota *office bureau*. Dan yang ketiga adalah organisasi internasional yang membantu kita dalam menghadapi pandemi. Ini yang kita bayar, Pak. Yang lainnya kita tunda sehingga untuk tahun depan. Tentunya ada efeknya, terkait masalah voting. Tapi biasanya organisasi internasional yang menunda hak untuk voting itu setelah kita tidak bayar dua tahun Pak, banyak Pak. Jadi kalau satu tahun, kita masih ini, mungkin masih aman. Dan situasi ini juga sudah kita sampaikan misalnya kepada para staf, kita sampaikan, kita akan menunda, tapi pasti kita bayar tahun depan. Saya rasa ini beberapa hal.

Terkait dengan masalah optimalisasi yang untuk keanggotaan kita di Dewan HAM, tadi Bapak tanyakan juga. Ada dua kegiatan utama Pak yang kita optimalisasi, kita gunakan, yaitu mengadakan *regional conference on humanitarian assistance*, jadi ini yang kedua. Yang pertama kita yang mengadakan. Jadi ini satu-satunya inisiatif dari Indonesia, tidak pernah ada Pak, di kawasan lain, mengumpulkan berbagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk menyamakan kapasitas. Karena kita tahu ada *gap* di antara negara masing-masing. NGO yang bergerak dibidang kemanusiaan itu beda-beda kapasitasnya, sehingga *inter operability*-nya tidak begitu bagus. Kemudian yang cukup penting Pak, mengadakan *regional forum on business and human right*. Jadi kita tahu banyak praktek bisnis, *businessman*, yang men-*dis regard* norma-norma *human right*. Ini ingin kita *main streaming*-kan di dalam regional forum sehingga ada kesamaan pandang dalam *business practices* di kawasan, terkait dengan masalah penghormatan prinsip-prinsip.

Mungkin demikian Pak Farhan.

Terima kasih Pak Sekjen.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Dirjen Multilateral.

Mungkin sekarang saya mengundang Pak Dirjen HPI untuk menyampaikan respon terkait dengan panja ZEE dan mungkin tadi pertanyaan Pak Effendi Simbolon.

**DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (FERRY ADAMHAR):**

Oke, terima kasih Bu Menlu.

Pak Rizki, kami terima kasih atas tawaran untuk saling berkoordinasi mengenai ini, memang RUU LK ini diprakarsai oleh Kementerian KKP dan kami juga sudah dilibatkan untuk jadi tim. Fokus kami dari Kementerian Luar Negeri adalah ingin memastikan agar undang-undang ini tidak bertabrakan dengan UNCLOS, karena undang-undang ini nantinya kalau sudah diketok pasti yang akan menyimak itu adalah dunia internasional. Karena ini akan bersentuhan dengan *compliant* kita dengan UNCLOS. Nah kenapa kita ingin ini tidak bertabrakan dengan UNCLOS? Karena optik diplomasi kita selalu kita berlindung di balik UNCLOS untuk mengecam semua klaim-klaim yang tidak yang tidak legal terhadap Indonesia, termasuk juga klaim-klaim yang tadi disebut mengenai *nine dash line*.

Nah kami akan ikut dalam tim apa, Tim Pansus ini. Nah draft yang sudah disampaikan kepada DPR itu untuk sementara kita lihat sudah sejalan dengan UNCLOS. Tapi nanti kalau ada dinamika yang berkembang, kami nanti juga akan berkoordinasi dengan Pak Rizki dan teman-teman Komisi I yang terlibat. Demikian, terima kasih Bu Menlu.

Terkait dengan pertanyaan Pak Effendi, bahwa Amerika memang belum meratifikasi UNCLOS. Dan ada satu wacana bahwa mereka akan meratifikasi. Nah satu reservasi Amerika terhadap Indonesia adalah mengenai Alki Timur Barat. Alki Timur Barat ini tetap dituntut oleh Amerika. Dan yang menarik adalah, setiap tahun Amerika selalu mengeluarkan *report* dari Kementerian Pertahanannya mengenai apa yang disebut dengan *Venom*. Sampai tahun 2018, laporannya tetap mencantumkan bahwa Indonesia harus menetapkan Alki Timur Barat. Tapi pada laporan tahun 2019 itu Indonesia nggak dicantumkan lagi. Dan ini menjadi pertanyaan menarik bagi kami dan minggu depan saya akan berkonsultasi dengan *counterpart* saya dari Kementerian Luar negeri Amerika, untuk membahas mengenai masalah ini. Saya ingin menanyakan Kenapa Indonesia tidak tercantum lagi di 2019. Apakah Amerika sudah *abundant* atau memang tidak *abundant*, tapi masih *impliedly*, begitu. Tapi ini memang menjadi persoalan kita dengan Amerika dan ini saya melihat mesti apa, dalam pertemuan minggu depan mungkin kami bisa mendapatkan *clear*, apakah Amerika masih tetap menuntut menuntut Alki Timur Barat itu.

Terima kasih Bu Menlu, terima kasih Pak Effendi.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Baik.

**F-PDIP (DRS. EFFENDI MS SIMBOLON, M. IPOL.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI (FERRY ADAMHAR):**

Terima kasih. Sebenarnya yang dipersoalkan oleh Amerika itu bukan Indonesia sebagai *Archipelagic States*. Yang dipersoalkan oleh Amerika adalah Indonesia dianggap tidak menyempurnakan Alki yang diminta oleh Amerika yaitu Alki Timur Barat. Ini memang tidak pernah diagendakan dalam level-level politis, karena ini lebih banyak dibahas di level misalnya seperti di IMO dan juga di level-level sifatnya teknis.

Dan yang kemudian yang kedua juga Amerika dalam menyampaikan keberatannya ini, dia masukkan ke dalam *report* apa yang disebut dengan *Annual Report on Venom* dan di *Annual Report on Venom* ini memang Amerika melisting semua negara-negara yang menurut Amerika dianggap tidak *comply* kepada UNCLOS. Dan sampai tahun 2018 seperti saya katakan tadi, Indonesia masuk dalam list itu. Banyak negara yang masuk dalam list ini, bukan hanya Indonesia saja, tapi untuk Indonesia itu dari tahun ke tahun berkurang.

Dan yang terakhir hanya tinggal satu yaitu mengenai hal kita, Alki yang timur-barat tadi. Nah kita tetap berpendapat bahwa Alki Timur Barat itu apa perlu atau tidak, gitu ya. Kita sampai sekarang menganggap itu tidak perlu. Karena 3 Alki yang sudah kita siapkan itu sudah memadai sebenarnya, gitu. Tapi Amerika kelihatannya masih apa *insist* di dalam Alki Timur Barat ini. Itu sebabnya minggu depan nanti dalam konsultasi kami dengan Kementerian Luar negeri Amerika, kami akan akan menegaskan mengenai masalah ini.

Demikian Pak Effendi.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Jadi Pimpinan, .... (*suara tidak terdengar*)

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, mohon waktunya kita jaga, karena ini sudah 3 jam, mungkin juga sebagian teman-teman kurang nyaman rapat berlama-lama. Mohon dipersingkat. Mungkin kita persilakan juga Bu Menlu untuk mengatur respon terhadap pertanyaan rekan-rekan tadi.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Baik, jika diizinkan Pak, mungkin kami mohon dulu, karena banyak sekali pertanyaan yang terkait mengenai masalah perlindungan termasuk masalah ABK dan sebagainya, sehingga Pak Direktur PWNI diizinkan untuk menyampaikan respon secara cepat mengenai masalah perlindungan dan juga beberapa kasus tadi yang dimunculkan oleh beberapa anggota. Setelah itu kami mohon untuk tertutup untuk pendalaman beberapa isu yang juga cukup banyak Pak.

Terima kasih.

**DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN BP2MI KEMENTERIAN LUAR NEGERI (JUDHA NUGRAHA) :**

Terima kasih Ibu Menlu.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan,**

## **Bapak/Ibu Anggota Komisi I yang kami hormati,**

Izinkan kami merespon beberapa pertanyaan terkait dengan isu perlindungan. Dan untuk efektivitas, kami mencoba untuk melakukan klustering, pertama isu pendataan WNI, kedua mengenai isu ABK dan yang ketiga mengenai kasus Ruth Sitepu.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan database Kementerian Luar Negeri pada hari ini terakhir, tercatat *by name by address* terdapat 3.011.202 Warga Negara Indonesia yang tinggal menetap di luar negeri. Namun kami dapat sampaikan bahwa data tersebut perlu dimutakhirkan. Dan data ini tidak mencatat Warga Negara Indonesia yang berstatus *undocumented*. Tantangan pemutakhiran data memang selalu menjadi tantangan perlindungan. Dapat kami sampaikan bahwa pada Tahun 2017 Bank Dunia memperkirakan ada 9 juta pekerja migran kita yang ada di luar negeri.

Tantangan pertama adalah tentunya berbeda dengan di dalam negeri, kalau di dalam negeri kita menggunakan stelsel pasif, di mana negara aktif mendaftar. Sedangkan di luar negeri kita menggunakan stelsel aktif, di mana warga negara harus aktif melakukan lapor diri. Jadi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Adminduk, Undang-undang 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan, dan yang terakhir Undang-undang 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran. Fakta yang kami tangani di lapangan adalah warga negara kita memang baru melapor ketika ada kasus.

Nah oleh karena itu kami menggunakan beberapa strategi. Pertama, proses lapor diri kita mudahkan dan kita sederhanakan. Kita mudahkan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menlu, kita membangun inovasi digital portal peduli WNI sehingga lapor diri dapat dilakukan secara online. Proses lapor diri juga dilakukan secara sederhana saat ini, karena sistem telah terintegrasi dengan SIAP Dukcapil, dan SIMKIM Imigrasi. Jadi warga kita ingin melapor, cukup masukkan nomor e-KTP dan e-passport, kami tidak lagi menanyakan data yang ada di KTP. KTP ada 23 elemen data dan passport juga sudah ada, jadi akan lebih sederhana bagi warga negara kita. Namun memang inti dari solusinya ini adalah meningkatkan *public awareness campaign*, meningkatkan kesadaran publik bahwa lapor diri itu adalah langkah pertama perlindungan. Nah untuk ini, Tahun 2021, kita akan melaksanakan program pemutakhiran secara serempak di 129 perwakilan, dan secara seragam dengan menggunakan portal peduli WNI.

Isu kedua adalah mengenai isu ABK, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menlu, selama Tahun 2020 terdapat 692 ABK yang tercatat mengalami masalah di 115 kapal ikan RRT. Ada 2 strategi utama, yang pertama penanganan kasus di hilir, dan yang kedua adalah pembenahan tata kelola di hulu. Hingga Desember 2020, kita telah berhasil memulangkan 589 ABK di 98 kapal ikan, termasuk kita berdasarkan diplomasi yang sudah kita lakukan di tingkat Ibu Menteri, kita telah bisa meminta pihak RRT untuk memulangkan langsung para ABK kita melalui jalur laut.

Yang pertama tanggal 7 November, sebanyak 157 ABK kita pulangkan melalui Bitung, Sulawesi Utara. Dan tanggal 30 Desember kita pulangkan juga melalui Batam. Namun dapat kami sampaikan juga bahwa ketika kita tidak menyelesaikan kasus di hulunya, ini ibaratnya seperti menggarami air laut. Dapat kami sampaikan bahwa mayoritas ABK kapal ikan itu memang tidak di *prepare* untuk berangkat ke luar negeri. Kebanyakan mereka berada di wilayah Pantura, daerah asalnya, tidak dibekali pengetahuan yang cukup, hanya passport dan kemudian berangkat ke luar negeri, tidak dijelaskan mengenai kontrak-kontraknya. Nah untuk itu pembenahan tata kelola di dalam negeri tentu menjadi sangat kritikal, dalam hal ini penyelesaian RPP Perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal ikan perlu dipercepat, lalu memastikan pendampingan dan standarisasi perjanjian kerja laut, memastikan setiap awak kapal kita yang berangkat memiliki kompetensi.



Dalam kasus kapal Long Xing 629, bahkan mereka tidak tahu apa itu *basic safety training*. Artinya ketika kapal itu dalam distress, bahkan dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan pelampung. Yang, lalu yang lainnya tentu ada *roadmap* ratifikasi C-188 ILO, dan juga MoU Penempatan ABK. Tadi Ibu Christina menyampaikan bahwa kita sedang dorong proses MoU penempatan khusus ABK, dalam hal ini kita sudah mendapatkan signal yang baik dari Korea Selatan, untuk MoU penempatan ABK kita di kapal Long Life. Sedangkan untuk RRT, telah ada pembicaraan awal antara Asosiasi Perikanan Jarak Jauh RRT dengan BP2MI. Yang harapan kita adalah proses penempatan akan bisa memotong *middle map*, yang terlalu banyak terjadi antara pihak pemilik kapal dan keluarga ABK yang ada di Indonesia.

Lalu terakhir mengenai MLE, kita dorong kasus-kasus penegakan hukum melalui *mutual legal assistant*, secara khusus tadi ada pertanyaan mengenai Long Xing 629, Pak Yan Mandenas tadi menanyakan, dalam hal ini pihak Bareskrim telah meminta untuk menghadirkan satu warga negara RRT yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagai supervisor. Dalam hal ini kami telah berkoordinasi dengan pihak Bareskrim untuk melakukan permintaan tersebut melalui mekanisme *mutual legal assistant*, yaitu antara Bareskrim diteruskan kepada pihak Hubinter Polri dan kemudian ditujukan kepada Otoritas Pusat Indonesia. Dalam hal ini ada di Kemenkumham untuk disampaikan kepada Otoritas Pusat di RRT. Pihak RRT menyampaikan kesiapannya untuk merespon permintaan tersebut melalui mekanisme MLE.

Lalu tadi disampaikan juga terkait kasus kapal Lu Huang Yu 117 dan 118, pihak Bakamla telah menangkap dua kapal ini pada tanggal 10 Juli 2020. Satu jenazah ditemukan di atas kapal dan kita telah menangkap 1 warga negara RTT yang diduga bertanggung jawab dan saat ini proses hukumnya sedang berlangsung.

Terakhir terkait dengan kasus Ruth Sitepu, dapat kami sampaikan bahwa seorang Warga Negara Indonesia bersuamikan Hilmi, Yohannes Hilmi, warga negara Malaysia dilaporkan hilang pada Bulan November 2016. Pihak keluarga melaporkan kepada Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 April 2018, jadi ada selang waktu 2 tahun pihak keluarga melaporkan kepada Kemlu.

Langkah-langkah yang sudah kami lakukan, pertama kita mengirimkan dua kali nota *diplomatic*, lalu kemudian kita melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, pihak Kontras dan juga pengacara. Ruth Sitepu. Kita juga telah berkoordinasi dengan Imigrasi Malaysia dan Imigrasi Indonesia, tercatat bahwa Ruth Sitepu tidak melakukan *border crossing* antara Malaysia ke Indonesia. Kita juga melakukan mengikuti *public inquiry* yang diadakan oleh Suhakam yaitu Komnas HAM Malaysia. Dapat kami sampaikan bahwa kasus hilangnya Ruth Sitepu di publik Malaysia dikaitkan dengan kasus hilangnya dua warga negara Malaysia yaitu pendeta Raymond Koh dan Amri Che Mat. Hal ini dikaitkan dengan isu kebebasan beragama di Malaysia.

Sebagai informasi, suami Ibu Ruth Sitepu itu adalah pendeta, *converted* dari muslim ke Kristiani, seperti itu. Namun hingga saat ini, hingga saat ini tidak ada bukti, saksi, maupun rekaman CCTV yang memperlihatkan ada kaitan antara kedua kasus ini. Dan dalam hal ini kami telah mendorong pihak imigrasi, eh pihak Polis Diraja Malaysia untuk bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Bareskrim untuk mendorong kerjasama *police to police*, untuk bisa memberikan kejelasan terkait dengan nasib warga negara kita yaitu Ruth Sitepu.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

**F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):**

Sedikit, Pimpinan, saya, Rizki.

Jadi dari, me-*refer* kepada penjelasan Pak Direktur tadi di awal, apakah kita bisa simpulkan bahwa 3 juta Warga Negara Indonesia yang berada di luar sana, tadi Bapak mengutip data dari Bapak, tidak termasuk dalam *roadmap* kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan vaksinasi ini?

**DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN BP2MI KEMENTERIAN LUAR NEGERI (JUDHA NUGRAHA) :**

Izin, kami tidak secara khusus menjawab kegiatan vaksinasi. Oh dijawab? Siap.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.  
Pimpinan, pendalaman.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Sebentar Pak, silakan Pak, sebentar.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Saya?

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Oh saya pikir Sekjen Kemlu.

Silakan Pak Lodewijk. Sebentar, Pak Lodewijk *online*.

Oh Pak Effendi lagi? Oke.

**F-PDIP (DRS. EFFENDI MS SIMBOLON, M. IPOL.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN BP2MI KEMENTERIAN LUAR NEGERI (JUDHA NUGRAHA) :**

**Bapak Effendi Simbolon,**

Berdasarkan komunikasi antara perwakilan kita, KBRI Kualalumpur, dengan pihak Polis Diraja Malaysia memang hingga saat ini belum ada kemajuan terkait dengan proses penyelidikan, khususnya juga terkait dengan apakah kasus hilangnya Ruth Sitepu juga terkait juga dengan hilangnya Bapak Raymond Koh dan Amri Che Mat, Warga Negara Malaysia. Namun dalam konteks ini seperti tadi kami sampaikan, kita mendorong, kita mendorong agar pihak Polis Diraja Malaysia, dapat segera melakukan langkah-langkah penyelidikan lebih luas, termasuk jika memungkinkan, kita mendorong kerja sama *police to police*, antara Indonesia dan Malaysia.

Demikian, Bapak.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Dapat kami tambahkan, Pimpinan.

**Pak Effendi Simbolon,**

Rumahnya bagus sekali, Pak, dari sini kelihatan rumahnya luar biasa bagusnya Pak.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Itu pintu lift, ya Pak Effendi ya?

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

**Pak Effendi,**

Jadi mungkin tadi sudah disampaikan Pak Judha, bahwa kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk *me-raise* isu ini kepada Pemerintah atau Otoritas Malaysia. Kementerian Luar Negeri, sebagai tambahan, pada tanggal 20 Januari kemarin juga sudah menulis surat kepada Polri, yang pada intinya meminta bantuan Polri untuk menjajaki kerja sama Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Malaysia dalam penyelidikan kasus ini. Dan besok Pak Effendi Simbolon, *my brother*, saya akan melakukan komunikasi secara virtual dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan memang isu ini akan saya sampaikan, saya *raise* kembali kepada Menteri Luar Negeri Malaysia untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan Otoritas Malaysia.

Demikian Pak Effendi, *by the way*, kapan-kapan saya main ke rumah yang cantik itu ya Pak ya.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Pak Effendi, itu pintu lift apa pintu rumah itu Pak?

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Itu pohon Durian itu Pak.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, Pak Sturman, kemudian Ibu Christina, sama Pak Yan. Silakan.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Terima kasih.

Saya tadi belum terjawab, pertanyaan saya tadi, Pak Direktur, tentang warga negara kita yang ada di Singapura, belum terjawab tadi kayaknya.

Terima kasih.

**DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN BP2MI  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI (JUDHA NUGRAHA) :**

Siap Bapak, maaf.

Terkait dengan upaya perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya yang mengalami kasus pidana sebagaimana diatur melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri dan diturunkan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018, bahwa tugas perwakilan RI adalah memberikan pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini adalah untuk memastikan warga negara kita mendapatkan hak-haknya secara adil di pengadilan setempat. Antara lain hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan juga hak untuk mendapatkan kekonsuleran dari perwakilan kita. Dan juga ditegaskan disitu bahwa tugas negara tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Nah dalam kasus ini kami juga telah mendapatkan laporan dari KBRI Singapura, bahwa KBRI Singapura juga telah melakukan pendampingan, akses kekonsuleran untuk memantau kasus ini. Seperti itu.

**F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):**

Izin, Pimpinan.

Pendalaman sedikit.

Mengapa saya ungkapkan di sini, Ibu Menlu? Karena banyaknya berhenti, setahun ini berhenti, banyaknya Warga Negara Indonesia khususnya dari Kepulauan Riau, yang nyebrang ke Singapura maupun Malaysia, sering sekali tidak dilengkapi dengan apa yang perlu diwaspadai, apa yang harus dikerjakan dan apa, bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bahkan mereka enggak pernah juga melaporkan kepada kedutaan besar kita yang berada di sana. Ini mungkin perlu pendampingan sebelum mereka berangkat ke sana, dari, bagaimana kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah setempat di Kepulauan Riau. Karena ini sering dan sering terjadi Pak, di Malaysia maupun ke Singapura. Karena begitu, sekarang memang enggak ada, berhenti total. Tapi sebelumnya luar biasa. Dan berangkat itu seperti kita berangkat, nyebrang ke Madura saja, kalau dari Surabaya. Enggak ada beban apapun. Tapi begitu bermasalah, nah itu yang baru kita melibatkan semua. Ini perlu, apa, pencerahan ini, dari Ibu Menlu dan beberapa jajarannya, lewat mana ini pencerahan ini, supaya tidak terjadi seperti ini lagi ke depan.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Sebentar Ibu, tadi ada interupsi dari Ibu Christina dan Pak Yan, silakan, singkat.

**F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):**

Ya, terima kasih Pimpinan.

Tadi Bu Menlu kan soal Ruth Sitepu bisa memberikan langkah-langkah yang akan diambil, besok akan berbicara dengan Kemenlu Malaysia dan lain-lain. Nah Pak Judha, terima

kasih. Tapi saya terpaksa harus kejar soal PP ini, karena kami juga mungkin bisa bantu Bapak, dari apa, rekan-rekan kami dari komisi lain, kami juga akan bentuk Panja Keamanan Laut itu, akan mulai bersidang bulan depan, dan disitu kami akan punya posisi untuk memanggil, untuk mengundang stakeholder lain dari mulai KKP, Kemenhub.

Nah jadi kami ingin tahu, di mana sekarang status PP ABK ini? Itu satu hal. Lalu yang kedua juga, di mana status MoU Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Domestik di Malaysia, sampai mana statusnya? Kami paham jika ada kesulitan yang dihadapi oleh Kemenlu, karena mungkin bukan apa, *lead sector*-nya. Tapi kami ingin bantu, karena ini menjadi kepentingan kita semua.

Terima kasih.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

Terima kasih Pimpinan, saya dalam sedikit.

Terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang di kapal Long Xing 629 dan juga kematian ABK di kapal Lu Huang 118 ya, saya pikir terima kasih untuk penjelasan tadi, namun saya pikir ini terkait dengan kasus kapal ikan China, ini sudah berulang kali terjadi. Nah saya tidak tahu, progress dari kasus tindak pidana dalam penyelesaiannya ini sampai sejauh mana, tetapi menurut saya ya, Kementerian Luar Negeri harus mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan berbagai macam tindak kejahatan yang sudah dilakukan berulang kali. Itu. Entah melalui MoU, atau kerja sama yang disepakati dengan China seperti apa, tetapi proses hukum yang sudah dilakukan oleh kita, ini tidak boleh terhenti. Karena saya hitung bahwa sekarang sudah hampir kita masuk 7 bulan. Nah 7 bulan ini sampai saat ini kasus ini seperti didiamkan begitu, didiamkan oleh Bareskrim, tidak tahu kendalanya di mana, ya, tetapi yang saya ikuti perkembangan terakhir, bahwa dari pihak China itu tidak bersedia untuk mengirimkan saksi yang juga tersangka itu, untuk diperiksa oleh Bareskrim.

Nah jadi ini yang saya berharap untuk ke depannya mungkin harus lebih komprehensif lagi penanganan masalah ini. Sehingga baik perusahaan yang mendistribusikan tenaga kerja ya, khusus ABK, tapi juga pelaku tindak pidana, harus diproses, dan kita tahu begitu, bisa mendapatkan progress laporan.

Jadi saya minta mungkin Pimpinan pada kesempatan ini, dibuat tertulis saja, disampaikan ke komisi, sejauh mana progress capaian akhir dari penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang dan kematian ABK di kapal ikan China.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik.

Satu lagi Bu, izin, Pak Lodewijk. Mohon singkat, Pak Lodewijk.

**F-PG (I. LODEWIJK F. PAULUS):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, silakan Ibu.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Saya kira lebih baik kalau dengan persetujuan Pimpinan dan Anggota, khusus untuk pendalaman yang sifatnya tertutup, mungkin kita sampaikan *in person* di sini, sementara Ibu-Bapak yang melakukan pemantauan secara virtual memang dari segi keamanannya memang lebih beresiko, Pak Ketua. Monggo.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik.

**Rekan-rekan yang ada di balkon,  
Rekan-rekan Anggota yang ada di *virtual meeting*,**

Karena penjelasan Ibu Menteri selanjutnya adalah bersifat rahasia, jadi rapat ini kita akan fokus di dalam ruang sidang ini saja. Siap, Pak Effendi.

**F-PDIP (DRS. EFFENDI MS SIMBOLON, M. IPOL.):**

*(secara virtual, suara tidak jelas terdengar)*

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

**Pak Effendi,**

Mungkin karena ini kan faktor *security* juga, dan di sini kan ada perwakilan dari fraksi, apakah diperkenankan agar kita juga bisa tetap menjalankan rapat ini, fungsi kita, tapi kerahasiaan negara dalam hal ini juga bisa terjaga.

Ya, baik kalau begitu,

**F-PDIP (DRS. EFFENDI MS SIMBOLON, M. IPOL.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Coba Ibu, bantu dijelaskan ke *brother*-nya ini.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

**Pak Effendi,**

Nanti kalau saya jelaskan secara khusus ke rumah, bagaimana Pak?

**F-PDIP (DRS. EFFENDI MS SIMBOLON, M. IPOL.):**

*(secara virtual, suara tidak terdengar)*

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Siap Pak, siap Pak Sukamta.

Jadi monggo Pak, monggo, keperluan kami adalah bahwa kalau beberapa isu itu terbuka, sebenarnya yang diperlukan oleh Ibu-Bapak adalah bukan penjelasan yang sifatnya normatif. Karena kalau normatif, Ibu-Bapak sudah membaca diberbagai media. Nah tapi kami ingin menceritakan *inside*-nya, latar belakang apa semuanya yang berada di belakang layar, yang tentunya ini tidak dapat kita sampaikan di ruang publik yang terbuka, agar kita semuanya dapat, idenya adalah agar Bapak-Ibu dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih dalam dari kami dalam melihat satu isu. Jadi kami monggo, persilakan, bagaimana mekanismenya tetapi yang penting kami mohon supaya apa yang kami sampaikan ini tidak di *quote* dan disampaikan kepada publik.

**F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.):**

Usul, Pimpinan, usul, saran.

**MENTERI LUAR NEGERI (RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI) :**

Dan mohon untuk tidak direkam juga, ya Pak.

**KETUA RAPAT (H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.):**

Baik, kalau begitu kita lakukan tertutup, hanya untuk Komisi X dan Kemlu, eh Komisi I dan Kemlu, belum, belum pindah, belum. Ingat Pak Effendi ini.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.12 WIB)  
(KETUK PALU: 3X)**

Jakarta, 26 Januari 2021  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

**SARTOMO, S.S., M.SI**  
NIP. 19680811 199603 1001